

**PEMBERONTAKAN PRRI  
DI SUMATERA BARAT TAHUN 1958-1961**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh

**JOKO SURYANTO**

NIM: 041314017

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH**

**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL**

**FAKULTAS KEGURUAAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

**YOGYAKARTA**

**2009**

SKRIPSI  
PEMBERONTAKAN PRRI  
DI SUMATERA BARAT TAHUN 1958-1961

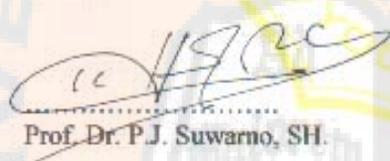
Oleh

JOKO SURYANTO

NIM: 041314017

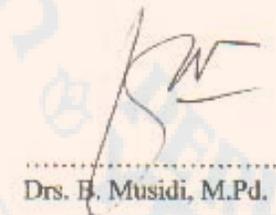
Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

  
Prof. Dr. P.J. Suwarno, SH.

Tanggal, 15-08-2009

Pembimbing II

  
Drs. B. Musidi, M.Pd.

Tanggal, 15-08-2009

**SKRIPSI**  
**PEMBERONTAKAN PRRI**  
**DI SUMATERA BARAT TAHUN 1958-1961**

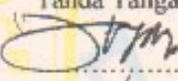
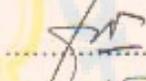
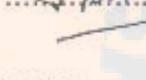
Dipersiapkan dan tulis oleh:

Joko Suryanto

NIM: 041314017

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal; 12-09-2009  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Yohanes Horsoyo, S.Pd., M.Si.	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M.Pd	
Anggota	: Prof. Dr. P.J. Suwarno, SH	
Anggota	: Drs. B. Musidi, M.Pd	
Anggota	: Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.	

Yogyakarta, 12-09-2009

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Dekan

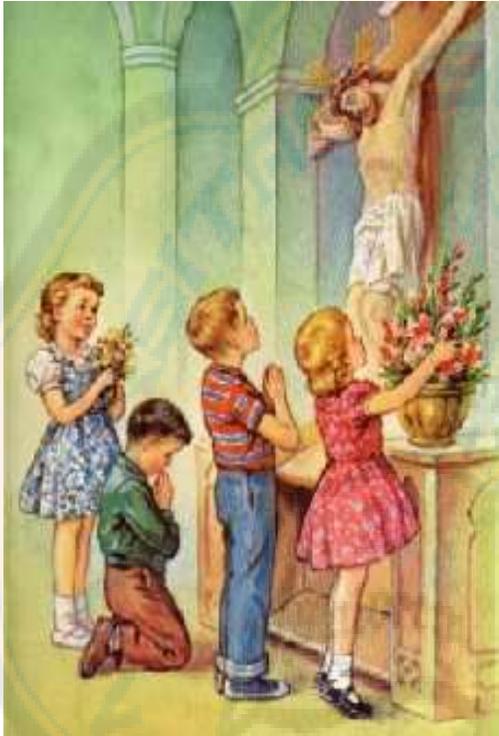
  
Drs. T. Sarkim, M.Ed., Ph. D.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Kesuksesan bukan milik orang-orang tertentu.  
Kesuksesan milik anda, milik saya, dan milik siapa  
saja yang benar-benar menyadari, menginginkan  
dan memperjuangkannya dengan sepenuh hati.  
(penulis).**

#### Persembahan



SKRIPSI ini khusus kupersembahkan  
Untuk Tuhan Yesus juru selamat hidupku  
Untuk Bapak dan Ibuku  
Untuk Saudara dan sahabat-sahabatku  
Untuk My Self

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

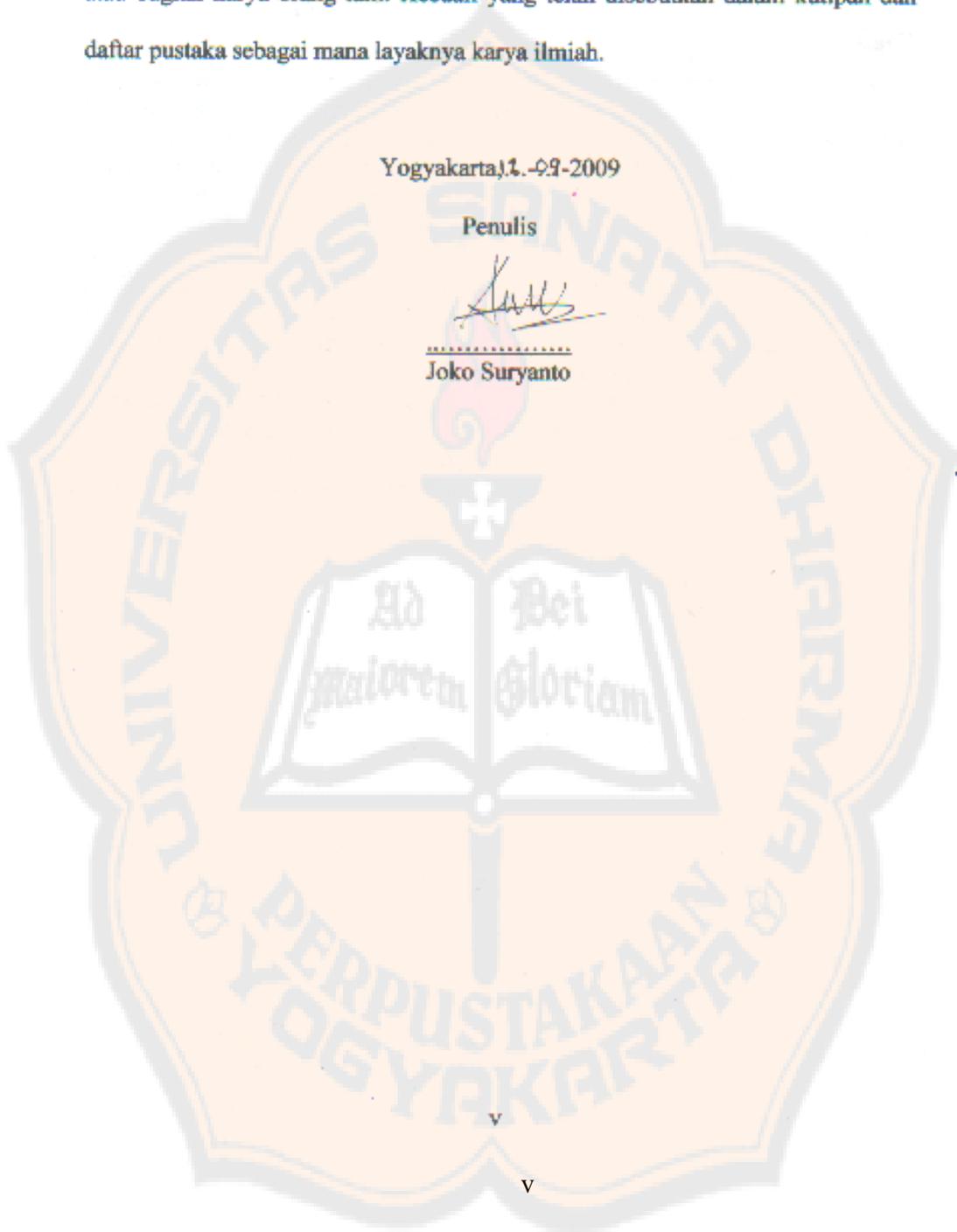
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain. Kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagai mana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 11-09-2009

Penulis



.....  
Joko Suryanto



**ABSTRAK**

**Joko Suryanto**  
**041314017**

**PEMBERONTAKAN PRRI  
DI SUMATERA BARAT TAHUN 1958 – 1961**

Skripsi ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis tiga permasalahan pokok yaitu; 1) latar belakang munculnya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat; 2) jalannya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat pada tahun 1958-1961; 3) akibat yang ditimbulkan dari Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat bagi Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Barat sendiri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, ditulis secara diskriptif-analitis dan dengan pendekatan multidimensional, yaitu politik dan sosiologi.

Hasil penelitian ini adalah; (1) Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat terjadi karena pemerintahan pusat menerapkan sistem sentralistik dan tidak memperhatikan pembangunan wilayah di luar pulau Jawa khususnya Sumatera Barat; (2) Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat tahun 1958-1961 terjadi karena pemerintahan pusat tidak mengabdikan tuntutan otonomi rakyat Sumatera Barat; (3) Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat tidak berhasil, maka secara langsung akan terjadi kekacauan dalam bidang politik, sosial-ekonomi bagi Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Barat sendiri.

**ABSTRACT**

**Joko Suryanto**  
**041314017**

**THE PRRI REBELLION  
IN WEST SUMATERA 1958 – 1961**

The purpose of the script was to describe and analyze the three basic problems; 1) the background of the PRRI Rebellion in West Sumatera; 2) the course of the PRRI rebellion in West Sumatera, 1958 – 1961; 3) the impact of the PRRI Rebellion in West Sumatera for the whole nation in general, and especially for the people in West Sumatera.

The method which was applied in the research was a historical method and was then descriptively and analytically written with a multidimensional approach of social sciences such as politics and sociology.

The result of the research shows that; (1) the PRRI rebellion in West Sumatera was caused by the centralized system that the central government implemented with less attention to the regional development outside Java especially in West Sumatera; (2) the PRRI Rebellion in West Sumatera 1958 – 1961 was triggered by the fact that the central government had put aside the demand for an autonomy proposed by the people of West Sumatera; (3) the PRRI Rebellion in West Sumatera had failed and caused some socio-economical and political disorder in the life of the whole nation in general, and particularly for the people of West Sumatera.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Bapa di surga yang telah melimpahkan kasih dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat Tahun 1958-1961”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini melibatkan banyak pihak. Pada kesempatan ini perkenankan penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dorongan, dan dukungan dalam bentuk apapun yang telah diberikan kepada penulis. Secara khusus penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ketua Jurusan pendidikan Ilmu pengetahuan Sosial, dan Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma.
2. Bpk. Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H., selaku Dosen Pembimbing I.
3. Bpk. Drs. B. Musidi, M. Pd., selaku Ketua Prodi Pendidikan Sejarah dan Dosen Pembimbing II.
4. Drs. A.A. Padi, selaku Pembimbing Akademik angkatan 2004.
5. Para Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta serta Universitas Sebelas Maret Solo.
6. Kedua orang tua penulis, Paulus Sukino dan Elisabet Tumini serta saudara sekandung seperti Mas Eko/Danik, Mbah Sri/Darno, Mas Widodo/Ivon, Nduk Itut, Tias, dan Radit yang selalu memberikan dukungan baik material maupun spiritual.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Teman Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta seperti Ponco, Sigit, Maria, Hesti, Cicil, Hendry, Okky, Tutik, Dwi (cui), Merita, yang selalu memberi motivasi untuk cepat-cepat lulus.
8. Keluarga besar Mas Beno dan Mbah Rini, seperti Mbah Hanani, Ali, Abi, Mbah Buyut, Mas Kingkin, Elang, Leo, Adi, Budhe Arjo, Mas Purwiji/ Tin.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan koreksi yang konstruktif maupun saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 12-09-2009

Penulis

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Kajian Teori.....	8
1. Pemberontakan.....	8
F. Hipotesis.....	13
G. Metodologi Penelitian dan Pendekatan.....	14
1. Metodologi Penelitian.....	14
2. Pendekatan.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II LATAR BELAKANG MUNCUNYA PEMBERONTAKAN</b>	
<b>PRRI.....</b>	<b>24</b>
A. Bidang Politik.....	24

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Kondisi Politik Bangsa Indonesia Tidak Stabil.....	24
2. Berkembangnya Partai Komunis di Indonesia.....	27
B. Bidang Ekonomi.....	32
1. Pembangunan Tidak Merata.....	32
C. Bidang Militer.....	36
1. Kekacauan Dalam Tubuh Angkatan Darat.....	36
2. Munculnya Dewan-Dewan di Sumatera .....	40
<b>BAB III PEMBERONTAKAN PRRI DI SUMATERA BARAT TAHUN</b>	
<b>1958-1961.....</b>	<b>44</b>
A. Proklamasi Berdirinya PRRI.....	44
B. Keterlibatan Amerika dan Sekutunya.....	49
C. Operasi Militer Penumpasan Pemberontakan PRRI.....	52
<b>BAB IV AKIBAT YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBERONTAKAN</b>	
<b>PRRI.....</b>	<b>68</b>
A. Akibat Dari Pemberontakan PRRI.....	69
1. Bagi Indonesia.....	69
a. Dampak Politik.....	69
b. Dampak Sosial Ekonomi.....	71
2. Bagi Masyarakat Sumatera Barat.....	73
a. Dampak Politik.....	73
b. Dampak Sosial Ekonomi.....	75
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>79</b>
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Peta Kepulauan Sumatera.....	84
Lampiran 2: Foto Tokoh-Tokoh PRRI.....	85
Lampiran 3: Piagam Persetujuan Palembang.....	86
Lampiran 4: Ultimatum Dewan Banteng.....	88
Lampiran 5: Jawaban Pemerintah Pusat Atas Ultimatum Dewan Banteng.....	89
Lampiran 6: Jawaban Atas Penolakan Ultimatum Oleh Pusat.....	90
Lampiran 7: Contoh Uang PRRI.....	91
Lampiran 8: Tokoh-Tokoh Yang Ditahan Pasca PRRI.....	92
Lampiran 9: Fakta/Kronik Pemberontakan PRRI.....	93
Lampiran 10: Silabus dan RPP.....	94

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia secara resmi telah memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Keberhasilan rakyat Indonesia ini ditandai dengan pengorbanan harta, benda bahkan nyawa manusia. Namun, setelah kemerdekaan tercapai bangsa Indonesia tidak berarti atau telah lepas dari perjuangan, sebagai *nasional-state* yang baru saja lepas dari situasi perang terhadap kolonialisme. Bangsa Indonesia berada dalam keadaan tidak menentu, baik secara fisik maupun psikis untuk mencari atau menempatkan diri pada situasi negara yang mandiri lepas dari tangan negara asing.<sup>1</sup>

Sebagai negara yang baru merdeka, bangsa Indonesia banyak menghadapi berbagai masalah dan gangguan yang terus bermunculan baik yang bersifat *ekstern* maupun *intern*. Optimisme cita-cita akan perubahan nasib bangsa setelah lepas dari penjajahan ternyata berubah menjadi perasaan bimbang bercampur frustrasi, ketidakpastian dan keputusasaan dari persoalan yang ada. Masalah ataupun persoalan yang ada sebagian berasal dari warisan zaman penjajahan dan karena situasi kepemimpinan pemerintahan (pribumi) yang tidak menentu. Pasca kemerdekaan para pemimpin yang kurang berpengalaman hanya mementingkan

---

<sup>1</sup> R.Z. Leirissa, *PRRI/Permesta Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1991, hlm. 7.

kepentingan pribadinya, sehingga banyak terjadi penyelewengan dalam birokrasi pemerintahan yang semua itu menambah jumlah persoalan-persoalan yang ada.<sup>2</sup>

Periode sejarah tahun 1949-1959 ditandai dengan banyaknya kemelut yang terjadi di dalam negeri. Adanya berbagai percobaan perlawanan terhadap pemerintahan pusat selalu dapat diatasi dengan kekuatan militer secara koersif. Salah satunya periode tahun 1958 sampai 1961 terjadi pembangkangan daerah terhadap pusat yang digerakan oleh dewan-dewan daerah di Sumatera.<sup>3</sup>

Sumatera dalam beberapa hal berbeda dari masyarakat lain di luar pulau Jawa. Meskipun luas daerah dan jumlah penduduknya relatif sedikit,<sup>4</sup> namun orang Sumatera khususnya Sumatera Barat memainkan peranan yang cukup penting dalam perpolitikan bangsa Indonesia. Kedudukan para pemimpin Minangkabau di masa pergerakan nasional dan dalam pemerintahan NKRI hanya kalah dari pemimpin dari Jawa yang merupakan 60% dari penduduk Indonesia. Kedua suku ini mewakili dua konsep yang bertolak belakang tentang pemerintahan negara untuk bersaing dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca-kemerdekaan, tetapi dalam persaingan tersebut kesatuan hirarki Jawa yang selalu menang.<sup>5</sup>

Keyakinan tradisional Jawa tentang kemakmuran negara tergantung pada kekuatan penguasa. Sedangkan dalam pandangan tradisional Minangkabau

---

<sup>2</sup> Audrey Kahim, *Dari Pemberontakan ke Integrasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm.1.

<sup>3</sup> Idris Soewardi, *Perjalanan Dalam Kelam; Sinarai Kisah Pemberontakan PRRI*, Yogyakarta, 2008, hlm. 71.

<sup>4</sup> Kurang dari dua juta jiwa dibanding sekitar enam puluh juta jumlah penduduk Hindia Belanda pada tahun 1939.

<sup>5</sup> Audrey Kahim, *op.cit.*, hlm. 3

kemakmuran negara justru tergantung pada keserasian dan kesesuaian antara unsur-unsur negara, yang merupakan kesatuan tertinggi dari rakyat yang diakui oleh adat Minangkabau. Suatu bentuk konsep pemikiran pemerintahan yang amat berbeda dari pandangan orang Jawa pada umumnya.<sup>6</sup>

Melihat cara pandang secara umum, Sumatera Barat pada dasarnya menghendaki suatu pemerintahan yang *otonom*.<sup>7</sup> Di awal tahun 1950-an, semua partai politik menganut prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pada waktu itu pembagian kekuasaan di pusat dan daerah tentang isu personil militer dan keuangan serta perkembangan PKI, merupakan persoalan yang menjadi sumber pertengkaran. Rakyat sadar bahwa revolusi yang baru saja selesai telah berhasil sebagian karena diatur, baik secara finansial maupun secara militer terutama dengan basis lembaga-lembaga yang terpisah dan berakar di daerah.<sup>8</sup>

Kecemasan rakyat terus berkembang dengan adanya perubahan situasi politik dalam negeri. Maka, timbul kegelisahan melawan apa yang dipandang sebagai dominasi Jawa dari aparat administrasi negara di daerah dan juga di pusat. Selama awal tahun 1950-an banyak terjadi perdebatan di parlemen di mana pendukung otonomi luas bagi daerah berjuang untuk aturan yang lebih identik menguntungkan daerah luar Jawa.

Tuntutan demi tuntutan dari rakyat Sumatera yang disampaikan ke pusat tidak satupun ditanggapi, hal ini menimbulkan kekecewaan yang memuncak dan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>7</sup> Dalam pengertian ini, pihak daerah diberi hak penuh untuk mengatur hal-hal yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Sedang hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional seperti keamanan, politik luar negeri, dan industrialisasi menjadi bagian pemerintah pusat Lihat R.Z. Leirissa, *op. cit.*, hlm. 9.

<sup>8</sup> Audrey Kahim, *op.cit.*, hlm. 225.

memunculkan pembangkangan oleh rakyat Sumatera khususnya masyarakat di Sumatera Barat. Pada tanggal 15 Februari 1958 rakyat Sumatera Barat membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan PRRI sebagai pemerintahan tandingan, dengan menegaskan bahwa mereka terbebas dari kewajiban dan taat kepada Sukarno selaku kepala negara saat itu. Perlawanan rakyat Sumatera ini kemudian dikenal dengan Pemberontakan PRRI.

Dalam penelitian yang berjudul “Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat Tahun 1958-1961” dipandang oleh peneliti menarik untuk ditulis. Penulis sendiri tertarik untuk menelusuri sejarah Indonesia pasca kemerdekaan khususnya di Sumatera Barat. Mengapa dahulu Sumatera Barat sempat melakukan pemberontakan terhadap Negara Kasatuan Republik Indonesia (NKRI) pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang munculnya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat?
2. Bagaimana jalannya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat pada tahun 1958-1961?
3. Apa saja akibat yang ditimbulkan oleh Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat bagi Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Barat sendiri?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Ketiga permasalahan di atas setelah dikaji dan ditelaah dalam penelitian ini, mempunyai tujuan sebagai berikut :

**a. Tujuan Umum.**

Menganalisis secara mendalam, tentang Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat Tahun 1958-1961.

**b. Tujuan Khusus**

- 1) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis latar belakang munculnya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat.
- 2) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis jalannya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat Tahun 1958-1961.
- 3) Untuk mendiskripsikan dan menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat bagi Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Barat sendiri.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan sosial dan sejarah Indonesia Pasca kemerdekaan.
- b. Bagi Dunia Keguruan dan Ilmu Pendidikan, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai sejarah Indonesia, sehingga dapat memperlancar pengajaran tentang perkembangan sejarah bangsa Indonesia.

- c. Bagi Mahasiswa Pendidikan Sejarah, untuk menambah dan melengkapi perbendaharaan pengetahuan tentang sejarah, khususnya tentang sejarah Indonesia baru.
- d. Bagi Peneliti Sendiri, sebagai syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber primer dan sekunder.

Beberapa sumber primer antara lain: Pertama, buku yang berjudul "*Kolonel Maluddin Simbolon: liku-liku perjuangan dalam pembangunan bangsa*" disusun dan ditulis oleh Payung Bangun dan terbit tahun 1996 oleh Pustaka Sinar Harapan, berisi tentang perjalanan tokoh pejuang dan pemimpin Pemberontakan PRRI yaitu Kolonel Simbolon. Dalam buku ini terdapat beberapa kumpulan kliping dari media massa dan transkrip wawancara serta media elektronik maupun dokumen-dokumen penting tentang Pemberontakan PRRI. Buku ini digunakan untuk mengetahui kesaksian dari pengalaman tokoh-tokoh PRRI dalam melakukan pemberontakan, yang nantinya ada dalam permasalahan kedua.

Kedua, buku yang berjudul "*Perjalanan Dalam Kelam; senarai kisah pemberontakan PRRI*", ditulis oleh Soewardi Idris dan terbit tahun 2008 oleh Beranda Publishing Yogyakarta. Buku ini mengulas tentang pengalaman dari

penulis sendiri yaitu Soewardi Idris selaku jurnalis dalam tiga setengah tahun Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Buku ini berisi tentang perjalanan tokoh-tokoh Pemberontakan PRRI dan pada akhirnya menyerahkan diri kepada pemerintah pusat, peristiwa ini merupakan akhir dari pemberontakan. Buku ini digunakan untuk menjawab permasalahan kedua, yaitu mengetahui persiapan pemberontakan serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna mengakhiri pemberontakan itu sampai akhirnya menyerah.

Sedang beberapa sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pertama, buku yang berjudul "*Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*" terbit tahun 2005 yang disusun oleh MC. Ricklefs. Buku ini menguraikan tentang sejarah Indonesia dengan perubahan-perubahan yang terjadi di segala bidang dari pengaruh kedatangan Islam di tanah air sampai perkembangan sejarah Indonesia masa reformasi. Buku ini digunakan untuk mengetahui keadaan politik bangsa Indonesia jauh sebelum pergolakan daerah bermunculan hingga Indonesia masa sekarang.

Kedua, buku yang berjudul "*Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta*" yang ditulis oleh Hadi Subandio, terbit tahun 2002 oleh P.T. Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Buku ini berisi tentang keterlibatan Australia dan Amerika Serikat serta sekutunya dalam Pemberontakan PRRI. Buku ini digunakan untuk menjawab permasalahan kedua, yaitu tentang perjalanan Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat yang dalam pemberontakan itu ada keterlibatan pihak asing.

Ketiga, buku dengan judul “*PRRI/Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*” buku ini ditulis oleh R.Z Leirissa pada tahun 1991 dan diterbitkan oleh Pustaka Utama Grafiti Jakarta. Buku ini mengulas tentang latar belakang munculnya Pemberontakan PRRI yang dapat dilihat dari berbagai faktor baik politik, ekonomi maupun militer bahkan sampai pengaruh perkembangan partai komunis. Dalam buku ini penulis mencoba menampilkan pandangan dan gagasan para eksponen PRRI yang diawali munculnya dewan-dewan daerah. Buku ini digunakan untuk mengetahui latar belakang pemberontakan itu terjadi dan digunakan untuk menjawab permasalahan pertama.

Keempat, buku yang berjudul “*PRRI, Pemberontakan Atau Bukan*” terbitan tahun 2009 oleh Medpress (Anggota IKAPI) yang ditulis Syamdani. Buku ini berisi tentang situasi masyarakat Minangkabau menjelang PRRI sampai pada Pemberontakan PRRI itu dapat dihancurkan hingga dampak yang ditimbulkan. Buku ini berisi tentang latar belakang munculnya pemberontakan dan akibat-akibat yang terjadi di bidang politik dan sosial-ekonomi. Buku ini digunakan untuk menjawab permasalahan ketiga.

### **E. Kajian Teori**

#### **1. Pemberontakan**

Penelitian yang berjudul “Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat Tahun 1958-1961” merupakan salah satu studi kasus sejarah nasional yakni sejarah sosial politik yang mengandung permasalahan-permasalahan yang sudah disinggung

sebelumnya. Guna mengkaji “Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat Tahun 1958-1961” diperlukan suatu konsep pemberontakan itu sendiri. Patokan terhadap konsep dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan kepastian tentang sesuatu yang akan dibahas. Secara etimologis pemberontakan berarti pengulingan kekuasaan atau pemerintahan yang sah dengan cara kekerasan. Pemberontakan yang bertujuan untuk mengulingkan pemerintahan tanpa mengubah bentuk pemerintahan tersebut.<sup>9</sup> Pemberontakan merupakan suatu situasi di mana disebabkan oleh kekecewaan dan ketidakpuasan yang dialami oleh manusia di dalam suatu sistem politik atau pemerintahan suatu negara. Secara operasional pemberontakan diartikan sebagai wujud tindakan melawan penguasa dengan kekerasan fisik dan dapat berupa perlawanan bersenjata, dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah yang disebabkan oleh rasa frustrasi dan ketidakpuasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, pakaian, rumah, dan pretise.<sup>10</sup>

Pada dasarnya semua bentuk revolusi mengandung bahaya yang mengancam eksistensi negara, oleh sebab itu harus dikendalikan bahkan dicegah, karena revolusi yang sering terjadi adalah pemberontakan yang disertai dengan tindakan kekerasan/anarkis penuh tipu daya dan tidak berperikemanusiaan. Ada dua motivasi/dorongan yang mendasari atau merangsang manusia untuk mengobarkan api pemberontakan, menurut *Aristoteles* yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan kehormatan. Berkaitan dengan keuntungan, manusia berusaha menghindari hal-

---

<sup>9</sup> Saerjono Soekamto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta, 1985, hlm. 416.

<sup>10</sup> Joh, .R.G. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta, 1993, hlm. 16.

hal yang merugikan dirinya atau senantiasa menginginkan keuntungan dalam segala hal bagi dirinya sendiri.<sup>11</sup>

Di lain fihak, manusia dikenal sebagai makhluk yang senantiasa mengejar kehormatan bagi dirinya sendiri, baik itu dengan cara memperoleh jabatan maupun harta benda yang dapat diwujudkan dalam sifat kepahlawanan dalam kehidupan di masyarakat. Untuk itulah, manusia senantiasa berusaha meraih penghargaan, kehormatan, kemuliaan dalam segala hal dan dalam setiap kesempatan, pengorbanan yang mereka berikan mempunyai pamrih (dalam bahasa Jawa). Tetapi apabila moralitas manusia telah hancur, maka napsu untuk mendapatkan penghargaan, kehormatan, dan kemuliaan itu akan memaksa si pelaku untuk menghalalkan segala cara, guna memuaskan napsunya bahkan dengan jalan memberontak atau revolusi secara membabi buta.<sup>12</sup>

Dalam perkembangannya *Aristoteles* mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan pemberontakan itu muncul yaitu: Pertama, kondisi manusia yang menyebabkan pemberontakan tersebut yang berarti keadaan lebih tertuju pada situasi atau kondisi sosial dan psikologi yang oleh *Aristoteles* disebut sebagai kondisi dasar yang merupakan ketidakpuasan terhadap ketidaksamarataan. Sesuai dengan alam fikiran demokrasi, semua orang berhak memperoleh keuntungan dan kehormatan serta penghargaan yang sama. Dengan demikian, bila terjadi ketidaksamarataan dalam kehidupan negara akan tercipta kondisi yang rawan bagi munculnya revolusi atau pemberontakan. Kedua, keinginan dan

---

<sup>11</sup> J.R. Rapar, *Filsafat Aristoteles*, Jakarta, Rajawali Pers, 1988, hlm. 121-122.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

impian yang hendak diraih yang dimaksud sesuatu yang berada dalam diri manusia itu sendiri dan merupakan penyebab utama bagi munculnya pemberontakan. Ketiga, kondisi politik yang tidak sehat yang dapat menyebabkan manusia tidak puas dengan apa yang mereka dapat dan berusaha memberontak.<sup>13</sup>

*Aristoteles* mengemukakan tentang cara-cara mencegah munculnya gerakan revolusi/pemberontakan yaitu dengan jalan; (a) pendidikan, (b) rasa hormat dan tunduk kepada hukum yang ada sebagai kesepakatan bersama, keadilan dalam hukum dan administrasi yang bersifat transparan.<sup>14</sup>

Masalah ini juga dikemukakan oleh *Karl Marx* bahwa pemberontakan itu muncul tidak hanya disebabkan oleh sekelompok orang yang merasa tertekan secara ekonomi maupun politik dari penguasa. Namun, karena frustrasi atas kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, maka segenap kelompok sosial bergabung karena merasa senasip sepenanggungan untuk bersama-sama/berevolusi yang tindakan ini timbul secara spontan atau tidak merupakan persekongkolan terlebih dahulu yang ditujukan kepada pemerintahan atau penguasa.

Melihat dari berbagai pandangan para ahli tersebut, maka revolusi atau pemberontakan itu terjadi berawal dari ketidakpuasan dan kekecewaan serta hilangnya kepercayaan yang dialami oleh manusia dalam suatu kekuasaan atau kepemimpinan dalam sistem politik suatu negara.

Masa kepemimpinan Sukarno dengan demokrasi terpimpin mengacu pada sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menyebabkan krisis di segala

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 123-124.

bidang yang dialami daerah-daerah khususnya di luar pulau Jawa. Pada tahun 1958 krisis ini memuncak dengan ditandai munculnya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat hingga tahun 1961. Lahirnya PRRI berkaitan dengan hilangnya kepercayaan daerah di luar pulau Jawa terhadap kebijaksanaan pusat/Jakarta. Rasa tidak puas karena merasa diperlakukan tidak adil, berkembang pada pertengahan tahun 1950-an.

Berkembangnya gerakan PRRI di Sumatera yang kemudian berpusat di Sumatera Barat tepatnya di Padang Bukittinggi, berlanjut menjadi pemberontakan. Lahirnya Pemberontakan PRRI adalah salah satu dari berbagai pertentangan yang saling berhubungan dan dilatarbelakangi secara umum yaitu adanya kekecewaan terhadap kepemimpinan Sukarno yang bersifat otoriter. Kekecewaan itu didasarkan atas ketidaksenangan terhadap struktur pemerintahan saat itu yaitu sistem pemerintahan dengan kinerja birokrasi yang tidak efisien dan korup. Masyarakat Sumatera Barat menganggap kemerdekaan yang sudah dicapai tidak mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat secara umum. Kabinet yang dibentuk tidak berumur panjang, karena tidak dapat mengatasi permasalahan yang hanya mementingkan kepentingan partainya serta diri sendiri.

Adanya kesenjangan sosial yang mencolok pusat dan daerah antara Jawa dan di luar Jawa dilihat dari bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Suatu penilaian atas perbedaan-perbedaan ini menyebabkan ketegangan antara daerah-daerah di luar pulau Jawa dengan pemerintahan pusat di Jakarta. Munculnya kelompok yang mengatasnamakan PRRI yang pada dasarnya tidak ingin

melepaskan diri dari pemerintahan Indonesia, tetapi hanya merupakan aksi protes terhadap perkembangan politik di pusat dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil. Mereka yang tidak puas dengan perkembangan politik dalam negeri berbuntut pada perubahan ekonomi yang pincang antara pusat dan daerah luar Jawa khususnya di Sumatera Barat. Hal itu, mendorong untuk mengadakan konflik dengan pusat melalui kekerasan yaitu pemberontakan, yang sebelumnya tuntutan dari daerah ke pusat tidak pernah ditanggapi. Dengan cara inilah diharapkan daerah Sumatera Barat dan wilayah luar Jawa pada umumnya mendapatkan perlakuan yang adil di segala bidang khususnya perbedaan perekonomian yang semakin mencolok antara Jawa dan luar Jawa melalui tuntutan-tuntutan salah satunya otonomi seluas-luasnya untuk daerah di luar Jawa.

### **F. Hipotesis**

Hipotesis adalah suatu kenyataan tentang hubungan yang dipercaya berwujud di antara gejala satu dengan gejala yang lain, di antara variabel satu dengan variabel lain atau sifat dari gejala sosial yang ada. Hipotesis di sini dapat diartikan suatu jawaban sementara dari suatu masalah yang masih harus diuji kebenarannya dalam penelitian nanti. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Kalau pemerintahan pusat masih menerapkan sistem sentralistik dan tidak memperhatikan pembangunan wilayah di luar pulau Jawa khususnya di Sumatera Barat, maka akan terjadi Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat.

2. Kalau pemerintahan pusat memperhatikan dan mengabdikan tuntutan otonomi rakyat Sumatera Barat, maka Pemberontakan PRRI akan berhenti.
3. Kalau Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat tidak berhasil, maka secara langsung akan terjadi kekacauan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi bagi bangsa Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Barat sendiri.

## **G. Metodologi Penelitian dan Pendekatan**

### **1. Metodologi Penelitian**

Sebagai suatu disiplin ilmu, sejarah harus memenuhi syarat yang berlaku bagi ilmu pada umumnya yaitu bersifat kritis, metodis, obyektif, dan sistematis. Obyek kajian sejarah adalah fakta, peristiwa dan rekonstruksi yang dikemas dalam ekplanasi historis tanpa meninggalkan urutan waktu. Fakta sejarah yang tanpa disertai kronologi, maka uraian hanya akan berbentuk dongeng atau legenda.<sup>15</sup> Setelah rekonstruksi sejarah dilakukan dalam bentuk ekplanasi, tahap selanjutnya adalah memberikan penjelasan kepada pembaca. Rekonstruksi yang dilakukan sebenarnya berusaha memberikan keterangan kepada suatu kelampauan yang penulis hadirkan kembali, dan kelampauan itu adalah suatu kepastiaan yang tidak terhindarkan. Pada tahap penerangan bagi pembaca yang mana rekonstruksi itu berhadapan dengan pemahaman empiris terhadap setiap gejala yang ada. Maka perlu bagi sejarawan untuk menjelaskan elemen-elemen yang jelas tentang

---

<sup>15</sup> G. Moejanto, " *Ilmu Sejarah dan Masa Depan*, " *Basis Bulan September*, seri XLII, No.9, Yogyakarta, 1994, hlm. 325.

peristiwa masa lampau dengan menyertakan teori sejarawan.<sup>16</sup> Ekplanasi dalam sejarah adalah penemuan, pemahaman, dan analisis dari ratusan ikatan yang mengikat sejumlah besar permukaan pernyataan kemanusiaan antara satu dengan yang lain, sehingga ikatan itu adalah fenomena historis untuk menjadi kesatuan yang mudah untuk dimengerti.<sup>17</sup> Untuk memperoleh ekplanasi yang jelas secara historis perlu memilih bagian-bagian yang otentik.

Menurut *Louis Gottschalk* ada empat tahap yang harus dijalani untuk merekonstruksi suatu peristiwa sejarah yakni mengumpulkan sumber, kritik sumber, interpretasi dan akhirnya penulisan.<sup>18</sup> Keempat tahap tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk memahami buku-buku, dokumen-dokumen serta koran atau majalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### **a. Pemilihan Topik**

Penelitian ini berjudul "Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat Tahun 1958-1961". Secara garis besar penelitian ini ingin mengetahui latar belakang muncul dan berkembangnya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. PRRI singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. PRRI diproklamasikan pada tanggal 15 Februari 1958 merupakan suatu pemerintah tandingan yang bertujuan untuk melawan pemerintah pusat.

PRRI ini dibentuk di Sumatera Barat dengan Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan Sukarno. Pemberontakan ini muncul atas

---

<sup>16</sup> Wayan Tegel Eddy, *Masalah Ekplanasi Dalam Disiplin Ilmu Sejarah*, seri XL, Basis No.11, Yogyakarta, hlm. 430.

<sup>17</sup> Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, PT Garamedia, 1993, hlm. 16.

<sup>18</sup> Louis Gottschalk, (ed). *Mengerti Sejarah*, Jakarta, Ui Press, 1986, hlm. 33-40.

dasar kekecewaan rakyat Sumatera terhadap pemerintahan pusat pada masa demokrasi terpimpin yang menerapkan sistem sentralistik. Pemberontakan PRRI ini dapat ditumpas dengan operasi militer oleh tentara pusat.

Keberhasilan atas penumpasan Pemberontakan PRRI menjadikan tentara tidak mendapat simpati dari masyarakat, karena penanganan pemerintah yang keras di bawah undang-undang darurat perang mengakibatkan tentara mendapat banyak kecaman. Di lain pihak, muncul dan berakhirnya Pemberontakan PRRI ini secara langsung telah membantu mempermudah usaha PKI untuk memperoleh kemenangan dalam percaturan politik di Indonesia.

### **b. Pengumpulan Sumber (heuristik)**

Dalam penelitian ini pengumpulan sumber dilakukan dengan membaca buku-buku hasil tulisan dari para tokoh Pemberontakan PRRI maupun dari tulisan orang lain selaku saksi mata dalam peristiwa tersebut. Selain itu penelaahan dari dokumen-dokumen dilakukan dengan mempelajari arsip-arsip yang berkaitan dengan Arsip Nasional yang banyak menampilkan bukti bukti dari peristiwa PRRI di Sumatera Barat.

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber sekunder yang diambil melalui studi pustaka. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan Sanata Dharma, perpustakaan UNS serta buku-buku lain yang di dapat dari toko-toko buku. Di dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan sumber, karena pelaku dalam peristiwa ini kebanyakan sudah meninggal, sehingga penulis menggunakan sumber dari buku-

buku yang ditulis beliau ataupun dari mereka yang mengalami kejadian baik secara langsung maupun tidak langsung.

### c. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan tahap dalam penelitian sejarah setelah proses pengumpulan data. Kritik ini dilakukan untuk mengetahui otentik atau tidaknya suatu sumber atau otentisitas (kritik ekstern) dan kredibel atau tidaknya suatu sumber atau kredibilitas (kritik intern).<sup>19</sup> Otentisitas artinya keaslian sumber, sedangkan kredibilitas artinya tingkat kepercayaan sumber untuk dapat dipercaya atau tidak sumber yang digunakan.

Dalam penelitian ini kritik intern lebih diperlukan daripada kritik ekstern. Kritik ekstern tidak perlu dilakukan karena keaslian bahan atau materi yang digunakan tidak perlu diragukan lagi. Kritik intern lebih diperlukan karena kebenaran sumber atau data masih perlu lagi dikaji apakah sumber atau data yang digunakan tersebut dapat dipercaya atau tidak kebenarannya. Dalam penelitian mengenai Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat tahun 1958-1961. Penulis melakukan perbandingan dari berbagai sumber yang berhasil didapat dan mencari kesesuaian dari sumber-sumber yang ada. Dengan membandingkan antara sumber satu dengan yang lainnya, maka akan diketahui keabsahan sumber-sumber yang ada tersebut. Untuk itu, perlu membandingkan sumber-sumber yang ada, yaitu antara sumber yang satu dengan sumber lainnya. Sebagai contoh membandingkan buku Syamdani berjudul "*PRRI Pemberontakan Atau Bukan*". hlm. 35-55, dengan

---

<sup>19</sup> Kuntowijoyo, 2001, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Bentang Budaya, Yogyakarta. hlm. 101-102.

buku R.Z. Leirissa yang berjudul “*PRRI/Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*”, hlm.1-9, kemudian buku Soewardi Idris yang berjudul “*Perjalanan Dalam Kelam*”; *sinarai kisah pemberontakan PRRI*, hlm.169-185. Selain itu buku karangan Audrey Kahin dengan judul “*Dari Pemberontakan ke Integrasi*”, hlm.251-254. Di dalam ke empat buku tersebut, terdapat uraian yang semuanya mempunyai pendapat yang hampir sama dan senada mengenai alasan atau latar belakang munculnya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Konflik antara pusat dan daerah khususnya dalam bidang ekonomi merupakan alasan utama munculnya pemberontakan. Meskipun demikian, masing-masing dari tulisan-tulisan tersebut mempunyai cara penjelasan yang berbeda-beda.

Dengan membandingkan antara sumber satu dengan yang lainnya, maka akan diketahui keabsahan sumber-sumber yang ada tersebut.

#### **d. Interpretasi**

Tahap ketiga ini merupakan tahap tafsiran terhadap sumber-sumber yang digunakan, kemudian dilakukan suatu uraian yang disertai dengan analisa-analisa. Interpretasi sering disebut biang subyektifitas. Untuk itulah subyektifitas dalam penulisan sejarah diakui tetapi sebesar mungkin untuk dihindari. Interpretasi itu ada dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisis yang berarti menguraikan sedang sintesis berarti menyatukan.

Analisa sumber merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena dalam interpretasi ini terdapat unsur penafsiran terhadap sumber yang sudah dinilai keabsahannya. Hasil analisa akan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu

penelitian, karena sejarah sebagai ilmu pengetahuan memandang setiap peristiwa dalam hukum kausalitas selalu berusaha menemukan sebab suatu peristiwa yang kemudian akan memunculkan suatu akibat dari peristiwa yang telah terjadi.

Dalam proses interpretasi sejarah, peneliti harus berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data guna mengetahui peristiwa-peristiwa yang mana yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jadi, untuk mengetahui sebab-sebab dalam peristiwa sejarah memerlukan pengetahuan tentang masa sebelumnya atau peristiwa masa lalu, sehingga pada saat penelitian akan diketahui situasi secara umum baik itu pelaku, tindakan yang diambil dan tempat kejadian.<sup>20</sup>

### **e. Penulisan Sejarah /Historiografi**

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari penelitian sejarah, yaitu tahap penulisan sejarah atau historiografi. Penulisan sejarah tidak terlepas dari sumber-sumber yang terkait di dalamnya, untuk memberikan gambaran mengenai rangkaian suatu peristiwa dalam penelitian sejarah. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologis suatu peristiwa sangat penting, sehingga akan lebih mudah mengetahui kapan peristiwa tersebut sebenarnya terjadi. Karena itulah, alur pemaparan data harus selalu diurutkan secara kronologis, agar nantinya si pembaca dapat dengan mudah memahami.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Yogyakarta, Ar-Rus Media, 2007, hlm. 74.

<sup>21</sup> Helius Syamsuddin., *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta, Ombak, 2007, hlm. 77.

## 2. Pendekatan

Dewasa ini dalam penelitian dan penulisan sejarah para sejarawan telah mengenal dan membiasakan diri menggunakan beberapa konsep, baik yang berasal dari lingkungan sejarah sendiri maupun yang diangkat dari ilmu-ilmu sosial lain. Ketika menganalisis suatu peristiwa atau fenomena masa lalu, sejarawan menggunakan berbagai konsep dari berbagai ilmu sosial tertentu yang relevan dengan pokok kajian. Hal ini dikenal dengan pendekatan multidimensional yang nantinya diharapkan dapat memberi karakter “Ilmiah” pada suatu penelitian atau penulisan sejarah.<sup>22</sup>

Penelitian mengenai “Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat tahun 1958-1961” menggunakan dua pendekatan yaitu politik dan sosiologi. Pendekatan politik dipakai untuk memahami tentang konsep pemberontakan itu sendiri yang akan dijelaskan dengan teori pemberontakan. Sementara pendekatan sosiologi akan membantu melihat suatu gejala dari aspek sosial yang mencakup hubungan sosial, interaksi, jaringan hubungan sosial yang semuanya mencakup dimensi sosial tingkah laku manusia. Segala tindakan yang menyangkut relasi antar individu diungkapkan secara tepat dengan melihat dimensi sosial perilaku orang seperti yang terwujud sebagai gejala.<sup>23</sup>

Pendekatan sosiologis dipilih untuk memberikan gambaran kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat selama bernaung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Suatu indikator yang dapat dilihat bagaimana kehidupan sosial

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 303.

<sup>23</sup> Sartono Kartodirjo, *op.cit.*, hlm. 87.

rakyat di luar Jawa pada umumnya dan Sumatera Barat khususnya. Selama sepuluh tahun lebih bangsa Indonesia sudah merdeka, tetapi pada kenyataannya masyarakat Sumatera Barat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Anggapan bahwa keadaan bangsa Indonesia khususnya Sumatera Barat tidak semakin baik disebabkan oleh kepemimpinan Sukarno. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya tindak kejahatan yang tidak terkendali, pengangguran serta keamanan rakyat yang kurang terjamin oleh negara.

### **a. Metode Penulisan**

Dalam penulisan sejarah ini digunakan secara bersamaan dua bentuk teknis dasar penulisan yaitu deskripsi dan analisis. Ketika sejarawan menyusun tulisan ini ada dua dorongan yakni mencipta-ulang dan menapsirkan suatu peristiwa. Dorongan pertama menuntut deskripsi sedang dorongan kedua menuntut analisis. Metode penulisan deskriptif merupakan metode penulisan yang bertujuan memberikan gambaran atau lukisan secara jelas, sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data-data atau fakta-fakta. Sedangkan metode analitis dalam penulisan ini adalah interpretasi dari data atau fakta, artinya bahwa penulisan tidak hanya sekedar disajikan secara naratif, namun disertai dengan analisis.

Penulisan secara deskriptif-analitis digunakan karena selain ingin menghadirkan masa silam melalui jejak-jejak yang ada, penulis juga ingin menjawab pertanyaan “mengapa” dan “bagaimanan” yang mendorong untuk berfikir analisis. Dalam penelitian ini, penulisan deskriptif-analitis menguraikan permasalahan tentang peristiwa Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Dengan

demikian metode penulisan deskriptif-analisis merupakan salah satu cara yang diharapkan bisa menghasilkan penulisan sejarah yang ilmiah.

## **H. Sistematika Penulisan**

Tulisan ini terdiri dari beberapa bab yang akan menjelaskan permasalahan-permasalahan pokok. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, maka ditampilkan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, hipotesis, metodologi penelitian dan pendekatan, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi penjelasan mengenai latar belakang munculnya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat terhadap NKRI. Dalam bab ini dijelaskan pula mengenai keadaan politik bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, munculnya beberapa partai besar seperti PNI, Masyumi, NU dan PKI serta sebab-sebab munculnya Pemberontakan PRRI.

Bab III merupakan penjelasan tentang jalannya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Bab ini membahas tentang keikutsertaan Amerika Serikat dan sekutunya dalam Pemberontakan PRRI serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil Presiden Sukarno guna menumpas pemberontak.

Bab IV berisi penjelasan tentang akibat-akibat yang ditimbulkan oleh Pemberontakan PRRI bagi Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Barat sendiri, baik dilihat dari bidang politik, sosial maupun ekonomi.

Bab V berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang pada intinya merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam bab pendahuluan.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penulis ingin menguraikan peristiwa secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Hal ini dilakukan supaya penulisan yang dilakukan benar-benar menjadi penulisan sejarah atau historiografi.



## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG MUNCULNYA**

#### **PEMBERONTAKAN PRRI**

Berbagai masalah kehidupan bangsa Indonesia pasca revolusi, tampak mulai muncul ke permukaan pada tahun 1950-an. Masalah yang pokok adalah bagaimana seharusnya sebuah negara dikelola dan sistem apa yang cocok untuk bangsa Indonesia yang sangat beragam. Keberagaman itu bukan saja dari sisi etnis atau suku bangsa yang ada di dalamnya, tetapi juga pada keberagaman pemikiran. Konsekuensi dari keberagaman tersebut adalah munculnya permasalahan di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi dan militer yang dapat mempengaruhi kestabilan jalannya roda pemerintahan negara.

#### **A. Bidang Politik**

##### **1. Kondisi Politik Bangsa Indonesia Tidak Stabil**

Akhir tahun 1949, setidaknya terdapat tiga permasalahan politik yang muncul ke permukaan yaitu; pemberontakan PKI tahun 1948<sup>24</sup> dan munculnya PDRI serta terbentuknya negara RIS. Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan terbentuknya UUDS yang berlaku sekitar 9 tahun, yaitu 1950-1959. Memasuki tahun 1950 permasalahan politik Indonesia tampak dari tatanan politik

---

<sup>24</sup> Dalam Pemberontakan Mediun, PKI dihancurkan oleh tentara terutama Angkatan Darat. Hal itu tentu tidak dapat dengan mudah dilupakan oleh PKI. Dengan menggunakan kekuatan tentara tersebut, PKI menghancurkan sebagai lawan-lawan yang sangat menentangnya sehingga kekuatan lawan dapat dikurangi.

yang diatur Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS)<sup>25</sup> yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Perubahan ini membawa dampak pada sistem penyelenggaraan negara, yaitu dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer, di mana seorang presiden bukan lagi sebagai kepala pemerintahan, melainkan merangkap sebagai kepala negara. Perubahan sistem penyelenggaraan negara ini pada waktu selanjutnya sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan pemerintahan negara dalam perebutan pengaruh elit-elit politik, dalam hal ini tidak terkecuali Sukarno sebagai presiden.

Sistem kepartaian yang menjadi inti mekanisme UUDS, dengan munculnya partai-partai baru tidak sanggup menghentikan polarisasi<sup>26</sup> yang dapat membahayakan kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia.<sup>27</sup> Polarisasi ini sudah nampak di awal tahun 1950, tetapi menjadi nyata dalam pemilu pertama 1955. Dari hasil pemilu pertama PNI dan NU mendapat dukungan terkuat khususnya dari pulau Jawa sedangkan partai-partai agama seperti Masyumi, Partai Katolik, Parkindo, PSI dan lain-lain, lebih banyak mewakili luar Jawa. Nampak kalau situasi politik tersebut terus berlangsung, maka bangsa Indonesia akan mengalami kehancuran.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Sebelum UUDS 1950, telah ada juga UUD yang disebut UUD RIS. Dalam UUD terdapat satu pasal, yang memungkinkan perubahan RIS menjadi NKRI yaitu pasal 144, yang memperbolehkan sebuah negara bagian untuk menggabungkan diri dengan negara lain sesuai kehendak rakyatnya. Berdasarkan pasal itu pula, maka pada tahun 1950 NKRI terbentuk kembali. Lihat R.Z. Leirissa, *op.cit.*, hlm. 7.

<sup>26</sup> A Partanto Pius Dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994, hlm. 606.

<sup>27</sup> R.Z. Leirissa *op.cit.*, hlm. 7-8.

<sup>28</sup> *Idem*

Selain masalah kepartaian, ketidakserasian sistem politik di tahun 1950-an tampak pada kedudukan Sukarno dan Hatta (Dwi Tunggal), mereka yang berjasa sebagai tokoh proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, Sukarno dengan gaya oratoris dan falsafah politik populisnya sedang Hatta dengan politik ekonomi dan rasionalismenya. Namun setelah bahaya berlalu keduanya disingkirkan, kedua tokoh ini menjadi semacam mitos dalam sejarah Indonesia. Pengaruh dan kekuasaan mereka lebih banyak diwujudkan secara informal.

Sentralisme melalui sistem droping pegawai muncul ketika Kabinet Ali II berkuasa antara tahun 1955-1957, mendesak putra-putra daerah untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, dan peranan mereka di pusat. Jendral Nasution berpendapat sebagai berikut; misalnya “Pada suatu saat di Sumatera Tengah, Gubernur, Residen, Kepala Kepolisian, dan Jaksa adalah sama-sama berasal dari Jawa atau harus berasal dari Jawa, hanya pimpinan militer masih asal putra daerah”.<sup>29</sup> Dalam keadaan demikian, birokrasi pemerintahan tidak memiliki kendali atau sistem kontrol yang mandiri, sehingga setiap pejabat dapat bertindak leluasa sepanjang tidak bertentangan dengan partainya. Tidak mantapnya norma-norma birokrasi ini menyebabkan korupsi merajalela, sehingga yang muncul di daerah adalah korupsi dalam badan pemerintahan. Julukan-julukan otonomi birokrasi, dan korupsi, adalah semacam karikatur dari kelemahan sistem politik pada waktu itu.

---

<sup>29</sup> A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jakarta, Gunung Agung, 1984, Jilid IV, hlm. 4-8.

Praktek-praktek semacam itu menimbulkan reaksi berupa semboyan dalam tuntutan otonomi. Selain administrasi pemerintah, dalam istilah otonomi termasuk pula dalam masalah pengaturan keuangan. Dalam hal ini pihak daerah diberi hak penuh untuk mengatur hal-hal yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Pengangkatan guru-guru, pembinaan kesenian dan kebudayaan daerah, dianggap bisa lebih efektif dilaksanakan oleh aparatur daerah. Sedangkan hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional, seperti keamanan politik luar negeri, dan industrialisasi menjadi bagian pemerintahan pusat.<sup>30</sup> Melalui sistem otonomi yang luas itu diharapkan sumber pertentangan antara pusat dan daerah bisa diatasi dengan memuaskan semua pihak. Dengan demikian, kelambanan pusat atau birokrasi yang berlebihan itu bisa pula diatasi.

## **2. Berkembangnya Partai Komunis di Indonesia**

Masalah lain yang terjadi menjelang PRRI adalah masalah ideologi politik. Sejak tahun 1952 PKI sudah mulai melancarkan suatu rencana perebutan kekuasaan melalui pemilu. Pengaruh PKI memang sangat terasa terutama dalam bidang politik dan kemudian dalam bidang ekonomi. Strategi perjuangan PKI yang berawal pada tahun 1952 yang nantinya bermuara pada peristiwa G-30-S-1965.

Dalam situasi di mana UUDS 1950 sangat membatasi untuk bergerak bebas, mau tidak mau PKI harus membuat situasi agar semua rencananya dapat berjalan dengan lancar. Bila pada masa sebelum tahun 1950-an PKI cenderung selalu melakukan kritik tajam yang sering mendiskreditkan Sukarno sebagai kolaborator,

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

maka setelah dekade 1950-an, PKI lebih cenderung berpihak kepada Sukarno dan sering menyanjung sang proklamator itu dalam berbagai kesempatan. Untuk tidak mengulangi kegagalan yang kesekian kalinya, maka PKI berusaha melakukan politik kooperatif dengan Sukarno. Dengan merangkul Sukarno, maka dapat dipastikan lawan politiknya jadi berkurang, yaitu tentara terutama TNI-AD, daerah luar Jawa dan kaum Islam.<sup>31</sup>

Sejak tahun 1953 hubungan PKI dengan Sukarno semakin erat, meski dapat diakui bahwa Sukarno bukan anggota PKI atau menyerah secara penuh kepada PKI. Namun lambat laun Sukarno mengambil alih restorika politik PKI. Pandangan politik internasional Sukarno kian lama kian sejajar dengan pandangan politik PKI, yang melihat bahaya yang paling utama adalah imperialisme dengan sistem ekonomi kapitalis. Sejalan dengan itu, Sukarno mulai memperkenalkan *neo-kolonialisme*, tetapi baru menjelang tahun 1960-an Sukarno mengariskan politik luar negeri Indonesia yang berporos Jakarta - Peking.

Pemilu tahun 1955 mampu memperlihatkan keberhasilan dari strategi PKI yang muncul sebagai pemenang keempat. Hal ini yang membuktikan bahwa usaha PKI melebarkan pengaruhnya melalui penggalangan massa dapat berhasil. Kekuatan massa terutama dari organisasi buruh SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang mencakup sekitar 1,5 juta buruh dari berbagai anggota buruh. Selain itu, PKI juga mampu merebut Barisan Tani Indonesia (BTI) dari

---

<sup>31</sup> Syamdani, *PRRI Pemberontakan Atau Bukan*, Yogyakarta, Medpres, 2008, hlm. 46.

tangan PNI dan memanfaatkan pengalangan massa tani terutama di wilayah-wilayah perkebunan.<sup>32</sup>

Sukarno mengumumkan Demokrasi Terpimpin dalam pidatonya tanggal 21 Februari 1957, agar semua golongan menyatukan diri dengan maksud semua bersama-sama duduk dalam satu meja makan dan meja kerja, yang berarti semua pihak mengakui kaum komunis sebagai bagian dari sistem politik Indonesia. Dalam sistem ini, Sukarno menginginkan adanya suatu kabinet “Gotong-Royong” yang di dalamnya kaum komunis mendapat kedudukan. Pemikiran inilah yang dalam sejarah Indonesia dinamakan Konsepsi Presiden yang akan memunculkan pertentangan dari beberapa kelompok.

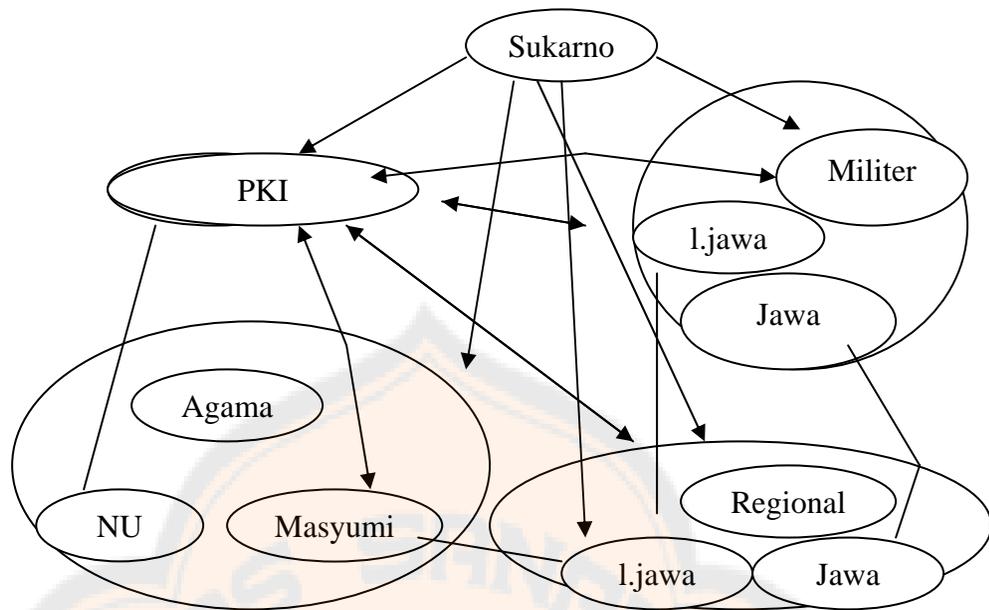
Kelompok-kelompok yang saling bertentangan secara garis besar dapat di bagi atas:<sup>33</sup>

Kelompok	Jenis
Idiologi Politik	Komunis-Nasionalis-Agama
Agama	Islam Reformis-Konservatif Dan Kristen
Regional	Jawa-Luar Jawa
Intelektual	Barat-Non Barat
Sipil-militer	Sipil-Militer

Hubungan kelompok-kelompok itu lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

<sup>32</sup> Mengenai perkembangan ini lihat Nugroho Notosusanto, *op.cit.*, hlm. 558.

<sup>33</sup> Syamdani, *op.cit.*, hlm. 60.



Sumber: Syamdani. 2008. *PRRI Pemberontakan Atau Bukan*, Yogyakarta: Medpres (Anggota IKPI).

Keterangan :

- Berada di bawah pengaruh
- ↔ Menentang
- Kejasama/mendukung

Melihat gambar di atas, terlihat bahwa semua kelompok yang bertentangan tetap berada di bawah pengaruh Sukarno, baik kelompok agama, militer, regional, maupun PKI. PKI sebagai sumber pertentangan dari kelompok-kelompok yang lain selalu dilindungi keberadaannya oleh Sukarno sehingga dari kelompok yang lain timbul pertentangan terhadap Sukarno. Pada mulanya kelompok-kelompok seperti kaum regional, militer, dan golongan agama selalu berada di belakang Sukarno, namun dukungan yang diberikan oleh Sukarno terhadap PKI telah memecah suara kelompok-kelompok tersebut. Dari kelompok agama, ada Masyumi yang menentang PKI dan ada NU yang setuju melakukan kerjasama

dengan PKI. Kemudian kelompok regional juga terpecah menjadi dua bagian yaitu kelompok Jawa dan luar Jawa. Meskipun perpecahan kelompok regional itu lebih disebabkan oleh faktor ekonomi sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya, namun peran Sukarno dalam mendukung keberadaan PKI dalam pentas politik nasional ternyata telah memicu untuk semakin lebarnya penentangan itu. Pihak luar Jawa sangat menentang keberadaan PKI sedangkan pihak Jawa lebih mentoleril keberadaan partai tersebut.

Di kalangan militer terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu yang menentang dan yang mendukung PKI. Hal tersebut telah memperlemah kekuatan militer yang sebelumnya memang sudah terpecah. Akibat dukungan yang diberikan oleh Sukarno terhadap PKI menyebabkan jurang perpecahan tersebut semakin bertambah lebar. Permasalahan yang muncul di kalangan militer tidak hanya masalah suksesi yang berlangsung dalam tubuh militer, melainkan terbentuknya kelompok baru yaitu kelompok militer luar Jawa di bawah kendali panglima-panglima daerah dan kelompok Jawa (pusat) di bawah panglima militer di Jakarta.<sup>34</sup>

Apabila keadaan itu terus berlanjut, maka situasi dan perkembangan sejarah bangsa Indonesia akan semakin memburuk salah satunya dari pengaruh komunis yang semakin besar, sehingga muncul gerakan-gerakan di daerah Sumatera dengan menamakan diri PRRI yang nantinya berlanjut melakukan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 61-65

pemberontakan. Tujuan mencegah kehancuran bangsa Indonesia dari pengaruh komunis yang telah mendapat simpati dari Presiden Sukarno.

## **B. Bidang Ekonomi**

### **1. Pembangunan Yang Tidak Merata.**

Dalam bidang ekonomi, bangsa Indonesia di tahun 1950-an berada pada titik yang sangat rendah di mana tidak terjadi keseimbangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Selama tahun 1950-an pembangunan lebih dipusatkan di daerah Jawa terutama Jakarta. Sementara intensitas pembangunan daerah luar Jawa sangat rendah.<sup>35</sup> Dari catatan yang ditulis oleh S. Takdir Alisjahbana pada tahun 1956. Didapat informasi bahwa dari keseluruhan ekspor Indonesia kira-kira 71% berasal dari pulau Sumatera yaitu 21% dari Sumatera Utara, 15 % dari Sumatera Tengah, dan 35% dari Sumatera Selatan. Sedangkan pulau Jawa sendiri hanya mengekspor 17%, selebihnya yaitu 12% berasal dari kepulauan lain. Jika dihitung dengan rupiah dan dirata-rata menurut jumlah penduduk, maka tiap-tiap jiwa di Sumatera Selatan setiap tahun menghasilkan deviden sebesar Rp. 1000,-, Sumatera Tengah Rp. 373,-, dan Sumatera Utara Rp. 339,-, sedang Jawa dan Madura hanya mempunyai deviden Rp. 27,50,- dan pulau-pulau lain Rp. 67,50,-.<sup>36</sup> Dari angka-angka di atas terlihat bahwa pemerintahan pusat telah melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap daerah tanpa mempedulikan kelangsungan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 39-40.

<sup>36</sup> Prof. Mr. S. Takdir Alisjahbana, *Perjuangan untuk Autonomi dan Kedudukan Adat Di Dalanja*, Jakarta, Pustaka Rakyat, 1957, hlm. 16-17.

pembangunan dan kesejahteraan daerah luar Jawa. Penggunaan dana yang didapat sebagian besar dipakai oleh mereka yang berada di pulau Jawa khususnya di Jakarta.<sup>37</sup>

Masalah korupsi dan kolusi menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada tahun 1950-an. Korupsi dan kolusi tidak saja terjadi di perusahaan yang mengelola keuangan negara, tetapi juga terjadi dalam lembaga pemerintahan. Banyaknya kasus korupsi dan kolusi ini yang menjadi salah satu penyebab mengapa Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil Presiden akhir tahun 1956. Seringnya presiden pergi ke luar negeri dengan jumlah rombongan yang sangat besar, menambah rumit keadaan pada tahun 1950-an dan terkesan menghambur-hamburkan uang. Apalagi kegiatan tersebut dilakukan di saat bangsa Indonesia sedang menderita secara ekonomi. Hal ini pernah diungkapkan oleh Muchtar Lubis:

“Sukarno juga tiap sebentar melakukan lawatan keluar negeri, sebuah hobby yang amat disukainya, membawa rombongan yang besar, menteri dan pejabat tinggi, wartawan. Cerita-cerita yang tersiar di kalangan masyarakat tentang kunjungan-kunjungan Sukarno keluar negeri penuh dengan cerita seks dan penghamburan uang rakyat yang luar biasa.”<sup>38</sup>

Selain itu, pengambilalihan perusahaan asing oleh pemerintah yang kemudian diserahkan kepada militer dan bukan kepada pihak sipil, merupakan permasalahan lain yang mewarnai keadaan perekonomian Indonesia tahun 1950-an. Penyerahan perusahaan asing kepada pihak militer tersebut terjadi karena

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>38</sup> Delier Noer, *Muhammad Hatta, Biografi Politik*, Jakarta, LP3S, 1988, hlm. 531.

adanya anggapan pemerintah bahwa pihak sipil tidak sanggup untuk melanjutkan kinerja perusahaan dengan baik.<sup>39</sup>

Kegagalan pembangunan ekonomi ini sangat dirasakan oleh berbagai lapisan dan golongan dalam masyarakat. Tindakan-tindakan pemerintah dalam masalah ekonomi, seperti penyalahgunaan sumber devisa, pemberian ijin istimewa kepada anggota partai penyokongnya, serta birokrasi perijinan yang sangat berbeli-belit, mempersulit para pedagang untuk berkembang. Sementara itu para pimpinan daerah yang diberi wilayah di luar pulau Jawa merasa kesal, karena alokasi dana keuangan bagi wilayahnya terlalu kecil, sehingga kesejahteraan penduduk jauh dari harapan. Maka mereka mencari cara sendiri dalam menghimpun dana yaitu dengan cara; mengekspor sendiri hasil pertanian lokal tanpa melalui prosedur adminitrasi di Jakarta, pemerintah pusat menamakan kegiatan ini sebagai Barter.<sup>40</sup>

Perdagangan bebas selama pertengahan tahun 1956 ini, tidak dilakukan melalui instansi-instansi perdagangan, seperti lewat bea cukai dan syarat lain-lain. Pihak daerah tidak lagi mengirimkan pajak atau semacamnya ke pusat (Jakarta). Demikian pula sebaliknya, pihak Jakarta tidak memberikan dana ke daerah. Pihak

---

<sup>39</sup> Adanya pengambilalihan perusahaan asing ini melegitimasi tindakan tentara untuk berbisnis. Dengan demikian, pada dekade 1950-an, tentara telah masuk dalam dua jaringan yang sangat jauh dari tugasnya yang utama yaitu sebagai Bhayangkari Negara. Kedua jaringan itu adalah pertama, jaringan politik dengan mendudukan para anggota tentara dan kepolisian pada struktur birokrasi negara; kedua, jaringan bisnis dengan menduduki jabatan-jabatan kunci pada perusahaan yang telah diambilalih dari tangan asing.

<sup>40</sup> Salah satu contoh adalah di Sumatera Utara, kegiaitan barter tersebut dilakukan oleh para panglima di wilayah-wilayah lain seperti Jawa Barat yang melalui pelabuhan di tempat tersebut. Dalam struktur angkatan darat, wilayah Sumatera Utara termasuk Teritorium I Bukit Barisan. Sejak 1950-1956, panglima wilayah ini dijabat oleh Kolonel M. Simbolon. Masalah dana prajurit untuk mendapatkan kesejahteraan serta dana operasi militer sudah mejadi masalah sejak awal tahun 1950-an. Gaji prajurit memang sangat minim seperti halnya gaji pegawai negeri pada umumnya. Tetapi yang merasa lebih mendesak adalah perumahan atau asrama bagi para prajurit ini yang memerlukan prioritas. lihat juga R.Z. Leirissa, *op.cit.*, hlm. 12.

daerah membeli barang-barang yang dibutuhkan dari luar negeri untuk pembangunan daerahnya sendiri seperti membangun jalan (aspal), membeli traktor dan bulldozer dari hasil perdagangan tersebut. Kegiatan ini tiba-tiba terhenti ketika pers pusat memberitahukan tentang adanya penyelundupan di Teluk Nibung. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang ditekan terus oleh Kabinet Ali Sastromidjojo II, terpaksa memerintahkan penghentian kegiatan perdagangan dan Direktur Kehakiman Angkatan<sup>41</sup>

Peristiwa ini membuat rakyat Sumatera Barat kecewa kepada pemerintahan pusat. Masyarakat Sumatera berfikir perlakuan pemerintahan pusat di Jakarta kurang adil terhadap pulau-pulau di luar Jawa terutama di Sumatera. Hal inilah yang mendorong munculnya pembangkangan dari daerah-daerah di luar Jawa. Berbagai tuntutan muncul salah satunya pemerintah daerah menginginkan agar *sistem sentralisasi* pemerintahan diganti dengan *desentralisasi* pemerintahan, yaitu dengan cara memberi otonomi seluas luasnya guna mencapai keadilan di bidang ekonomi bagi kesejahteraan rakyat luar pulau Jawa khususnya Sumatera Barat. Hatta sendiri cukup paham dengan tuntutan daerah-daerah tersebut, bahkan mendukung. Menurut Hatta, bagaimanapun pemerintahan pusat tidak cukup bisa mengerti secara keseluruhan bagaimana kebutuhan dan berbagai dilema yang dialami oleh daerah di lapangan dalam melangsungkan pembangunan. Hanya

---

<sup>41</sup> Barbara Sillars Harvey, *Permesta Pemberontakan Setengah Hati*, Jakarta, Grafiti Pers, 1983, hlm. 53-54.

mereka yang ada di daerah yang menurut Hatta, yang paham dengan situasi daerahnya dan mengusahakan yang terbaik untuk pembangunan daerahnya.<sup>42</sup>

## C. Bidang Militer

### 1. Kekacauan Dalam Tubuh Angkatan Darat

Sistem politik berdasarkan UUDS yang dilaksanakan di Indonesia dirasa malah menghambat perkembangan politik bangsa Indonesia, hal ini juga dirasakan oleh kelompok militer. Sebagai tentara yang lahir dari rakyat dalam kancah perjuangan, kelompok militer menganggap dirinya bukan hanya tentara, melainkan juga sebagai pembina masyarakat. Selain itu, kepentingan militer berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. Salah satu manifestasi ketidakcocokan sistem politik itu adalah Peristiwa 17 Oktober 1952.<sup>43</sup> Dalam peristiwa ini terjadi demonstrasi di Jakarta yang terdiri atas massa yang berjumlah sekitar 10.000 orang. Menurut Kolonel Z. Lubis, permasalahan berawal dari masalah *Nederlande Militaire Missie* (NMM), suatu kelompok militer Belanda yang diperbantukan pada TNI-AD sejak 1950. KSAP Simatupang dan KSAD Nasution adalah pendukung NMM untuk melatih TNI secara profesional, tetapi ditentang perwira lain yang dipimpin oleh Kol. Bambang Supeno. Dualisme ini berpengaruh ke luar TNI-AD, yakni ke dalam dunia kepartaian, sehingga menimbulkan polarisasi yang terus berkembang. Kubu PSI mendukung Nasution dan kubu PNI mendukung Bambang Supeno. Dalam parlemen, polarisasi ini

---

<sup>42</sup> Audrey R. Kahin & George Kahin, *Subversi sebagai Politik Luar Negeri, Menyikapi Keterlibatan CIA di Indonesia*, Jakarta, graffiti, 1997, hlm. 53.

<sup>43</sup> Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa di mana TNI AD menuntut pembubaran Parlemen.

dipertajam melalui pembicaraan masalah intern TNI-AD yang menyebabkan goncangan dalam tubuh TNI-AD.<sup>44</sup>

Keretakan dalam tubuh KSAD tersebut ternyata dapat diselesaikan sendiri oleh para perwira senior TNI-AD seperti Kolonel Sugeng yang menjadi kepala KSAD baru saat itu. Untuk mengatasi permasalahan di kalangan para perwira senior TNI-AD mengadakan suatu musyawarah bagi para perwira dan panglima senior pada bulan Februari 1955 di Yogyakarta yang menghasilkan kesepakatan tentang Piagam Yogyakarta. Namun, dalam kesempatan itu terjadi permasalahan baru yaitu campur tangan Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri dalam soal intern TNI-AD, yang berakibat Bambang Sugeng minta berhenti, selanjutnya diganti oleh Wakil Kepala Staf AD Kolonel Lubis. Masalah pengangkatan KSAD diserahkan pemerintah kepada TNI yang akan menentukan jumlah calon, dari calon itulah pemerintah akan memilih seorang calon KSAD.

Daftar calon yang disusun MBAD terdiri dari beberapa perwira senior antara lain; Kolonel Gatot Subroto, Kolonel M. Simbolon, dan Kolonel Lubis. Namun, ketiga perwira senior itu menolak pencalonan tersebut.<sup>45</sup> Dalam situasi ini, Kolonel Lubis didatangi Harsono Tjakroaminata tokoh dari PSII yang menjabat Wakil Perdana Menteri, mengusulkan agar A.H. Nasution diangkat menjadi KSAD kembali. Pada mulanya Nasution menolak, tetapi pada pertemuan kedua Nasution bersedia dengan memberi syarat agar semua panglima mendukung.

---

<sup>44</sup> Audrey Kahim, *op.cit.*, hlm. 565-566.

<sup>45</sup> R.Z. Leirissa, *op.cit.*, hlm. 28.

Presiden sendiri menerima pencalonan itu dengan mengajukan dua syarat kepada Nasution; pertama, agar Nasution menyatakan Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah suatu kekeliruan. Kedua, agar Nasution mengakui Supremasi Sipil atas TNI-AD. Sebaliknya, Nasution juga mengajukan syarat-syarat kepada pemerintah yaitu agar kebijaksanaan mengenai TNI-AD dilaksanakan melalui undang-undang (UU) dan dia diberi anggaran yang cukup untuk membenahi TNI-AD.<sup>46</sup>

Sementara itu muncul sumber masalah baru, pada bulan Oktober 1956 beberapa hari setelah Sukarno kembali dari kunjungan ke negara-negara komunis. Diadakan suatu pertemuan tertutup di kediaman resmi Kolonel Sukanda Bratamanggala di Jalan Riau 47 Jakarta (sekarang jalan Martadinata). Sebagai Inspektur Jendral Latihan dan Pendidikan Sukanda Bratamanggala mempunyai hubungan yang sangat luas dengan perwira-perwira AD. Dalam pertemuan itu sejumlah perwira membicarakan masalah perkembangan politik, terutama mengenai bahaya komunisme, korupsi dan pimpinan angkatan darat. Kelompok ini menjadi inti dari apa yang dinamakan Kelompok Perdamaian Nasional atau Kopernas.<sup>47</sup>

Sementara itu, kelompok perwira lulusan SSKAD mempunyai kebiasaan membicarakan perkembangan politik dalam pertemuan-pertemuan reuni. Sejak lulusan pertama tahun 1952 sudah dibentuk suatu ikatan lulusan SSKD yang

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 28. Lihat juga wawancara dengan M. Simbolon, Jakarta 1986.A.E. Kawilarang, *Untuk Sang Merah Putih* Jakarta, 1988, hlm. 283.

<sup>47</sup> A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 10-27 dan. 21-25. Lihat juga wawancara dengan H.N. Sumual Jakarta, 1986. Salah satu manifestasi dari kekwatiran itu adalah penangkapan Ruslan Abdulgani. lihat juga Joh Legge, *Sukarno, Sebuah Biografi Politik* (terjemahan), Jakarta, Sinar Harapan 1985, hlm. 309-310.

dinamakan Korps Perwira SSKAD. Sekitar tahun 1956 jumlah anggota sudah mencapai ratusan termasuk lulusan dari luar negeri seperti *Hogere Krijgs School* dari Belanda, *Fort Leavenworth* dan *Fort Benning* (AS). Setiap tahun Korps Perwira SSKAD mengadakan reuni untuk membicarakan usul-usul perbaikan TNI-AD. Pada dasarnya Korps Perwira SSKAD ini berpendapat bahwa TNI-AD adalah tentara yang lahir dalam perang kemerdekaan. Kepeloporan TNI dalam perang kemerdekaan merasa bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa Indonesia.<sup>48</sup>

Pertemuan Reuni pada tanggal 19 November 1956 merupakan peristiwa yang istimewa.<sup>49</sup> Selama tahun 1956 seluruh tindakan KSAD dianggap menimbulkan keretakan baru dalam tubuh TNI-AD. Cara-cara yang ditempuh KSAD dalam mengatasi soal barter dengan *tour of duty* yang diselenggarakan mulai Agustus 1956 justru menimbulkan gejolak baru. Misalnya, tindakan atas Letkol Abimanyu sebagai Panglima Kalimantan yang dipanggil ke Jakarta dan dikenakan tahanan rumah. Cara seperti itu menimbulkan kekwatiran dan keresahan bagi perwira, sehingga tidak menutup kemungkinan keutuhan bangsa dan negara akan terancam. Tindakan-tindakan KSAD dinilai tidak sejalan dengan Piagam Yogya dan keputusan rapat perwira-perwira angkatan darat di Yogyakarta. Sebaliknya, tindakan KSAD bahkan menimbulkan guncangan baru yang sebenarnya hendak diselesaikan, maka dalam reuni SSKAD pada tahun 1956 keinginan untuk menggantikan pimpinan AD muncul kembali.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> A.H. Nasution, *op.cit.*, hlm. 30-31.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 38-40.

Dengan demikian krisis dalam kehidupan politik dan ekonomi serta militer sejak pertengahan tahun 1950-an itu memuncak pada bulan November 1956. Usul-usul perbaikan makin terkristalisasi karena setiap tuntutan tidak pernah ditanggapi. Di satu pihak, ada yang optimis keadaan bisa membaik bila kaum komunis diikutsertakan dalam pemerintahan dan di pihak lain ada yang sangat khawatir, mengingat kaum komunis adalah alat perjuangan komunis internasional. Pendapat pertama berasal dari Presiden Sukarno sedangkan pendapat kedua berasal dari sejumlah perwira TNI-AD. Sementara pimpinan AD semakin bersifat legalistik karena proses politik semakin tidak kondusif untuk membangun kembali keutuhan tentara. Dalam situasi yang semakin memburuk itulah muncul gerakan-gerakan daerah yang bertujuan mencegah kehancuran yang lebih parah, rakyat Sumatera berusaha untuk menghidupkan kembali perjuangan dari masa perang kemerdekaan untuk melawan pusat.

## **2. Munculnya Dewan-Dewan di Sumatera**

Pemilu pertama tahun 1955 membuat Angkatan Perang Republik Indonesia dan Angkatan Darat menjadi resah, karena PKI berhasil mendapatkan suara terbanyak keempat dan tidak satupun dari konstestan yang ada memperoleh suara mayoritas.<sup>51</sup> Sementara itu daerah-daerah luar Jawa semakin tidak puas dengan kekuasaan yang semakin sentralistik sebagai protes terhadap pusat, sejumlah penguasa militer daerah mulai membangkang. Penyelundupan mulai marak di Sumatera yang kegiatan ini biasanya dilakukan oleh kelompok militer seperti

---

<sup>51</sup> Payung Bangun, "*Kolonel Maludin Simbolon*" *liku-liku perjuangan dalam pembangunan bangsa*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 99.

Kolonel Simbolon. Kegiatan semacam ini umumnya mendapat dukungan masyarakat Sumatera karena memikirkan kesejahteraan rakyat Sumatera sendiri.

Sebagai KSAD Nasution secara pribadi perlu mendekati para panglima daerah yang mencoba menyeleweng. Tetapi daerah menanggapi cara Nasution tersebut sebagai syarat ketakutan pusat terhadap daerah yang mulai ada pembangkangan. Pada tanggal 20-24 November 1956 berlangsung reuni Devisi Banteng di Padang, reuni tersebut mengevaluasi hasil kemerdekaan dan menyimpulkan; bahwa setelah 6 tahun merdeka pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya terutama wilayah luar Jawa.

Kalau diamati kelihatannya pergolakan di Sumatera Barat menunjukkan adanya kepentingan dari kalangan masyarakat tertentu yang belum terwujud. Dalam keadaan demikian, maka masyarakat menilai bahwa pemerintah pusat tidak sanggup mengatasi keadaan tersebut, sehingga prakarsa beralih ke eksponen-eksponen militer di setiap daerah. Pada tahun 1956 dan 1957 berturut-turut muncul Dewan Banteng (Sumatera Barat) dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein, Dewan Gajah (Sumatera Utara) dipimpin oleh Kolonel Simbolon, Dewan Garuda (Sumatera Selatan) dan dipimpin oleh Letkol Berlian.<sup>52</sup> Dari sini, nampak kalau politik dalam negeri Indonesia dari tahun ke-tahun mengarah pada polarisasi pusat-daerah dan memerlukan tindakan-tindakan yang serius untuk mengatasinya.

Pada bulan September tahun 1957 Perdana Menteri Djuanda menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) dengan mengundang jajaran

---

<sup>52</sup> Hadi Soebadio, *Keterlibatan Australia Dalam Pemberontakan PRRI/Permesta*, Jakarta, P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 199.

pemerintah dan militer termasuk perwira yang dianggap membangkang. Masalah-masalah politik dibicarakan dan dibentuk “Panitia Tujuh” untuk menilai para perwira pembangkang, sebulan kemudian menyusul musyawarah pembangunan nasional untuk menangani masalah ekonomi, akan tetapi musyawarah nasional maupun musyawarah pembangunan nasional tersebut tidak mampu menyelesaikan polarisasi pada konflik pusat-daerah.

Percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno dalam peristiwa Cikini yang terjadi pada tanggal 30 November, membuat hubungan Sumatera Barat dengan pusat semakin memanas yang pada saat itu usaha penyelesaian sedang dilakukan oleh P.M. Djuanda. Dalam peristiwa tersebut pemerintah pusat maupun pimpinan TNI-AD mencurigai para perwira pembangkang sebagai pelakunya.<sup>53</sup> Akibatnya, para perwira pembangkang yang dijadikan kambing hitam mengadakan serangkaian rapat evaluasi yang diselenggarakan di Sumatera Barat, salah satunya diselenggarakan di Sungai Dareh pada tanggal 9 dan 10 Desember 1957. Pertemuan di Sungai Dareh menghasilkan wadah baru, yaitu mempersatukan beberapa daerah yang bergolak di Sumatera dan daerah lain serta membentuk dewan perjuangan. Dalam jajaran kepemimpinan Dewan Perjuangan dipegang oleh Ahmad Husain dari Dewan Banteng dan terdapat juga wakil dari dewan lain serta para politisi Masyumi seperti;<sup>54</sup> Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Mohammad Natsir, Burhanudin Harahap yang pada waktu itu menyingkir ke Padang karena desakan PKI. Pertemuan di Sungai Dareh membicarakan soal-soal

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 200.

<sup>54</sup> Lihat lampiran, No. 2.

yang menyangkut pertahanan yang diselenggarakan dalam rapat tertutup dan menghasilkan kesepakatan antara lain;<sup>55</sup> tuntutan dibentuknya kabinet yang lebih berwibawa, berintegrasi tinggi, tanpa cacat untuk menyelesaikan kemelut antara pusat dan daerah. Lebih berwibawa artinya terdiri dari orang-orang yang lebih dipercaya oleh daerah yang bergolak yaitu Hatta dan Hamengkubuwono IX, kalau kedua orang tersebut memimpin kabinet keyakinan terselesainya permasalahan pusat dan daerah akan terwujud.<sup>56</sup>

Kesimpulan dari bab II ini adalah munculnya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat yang dilatarbelakangi oleh kondisi politik bangsa Indonesia yang tidak stabil, seiring dengan berkembangnya partai komunis di Indonesia. Selain itu, pembangunan ekonomi yang tidak merata yang hanya berpusat di Jawa. Pemerintah daerah menginginkan sentralisasi pemerintahan diganti dengan desentralisasi dengan cara memberi otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah di luar pulau Jawa. Kakacauan dalam tubuh angkatan darat (AD), sehingga muncul Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat yang dipelopori oleh dewan-dewan daerah di Sumatera yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pusat. Oleh sebab itu, kalau pemerintah pusat masih menerapkan sistem sentralistik dan tidak memperhatikan pembangunan wilayah di luar pulau Jawa khususnya di Sumatera Barat, maka akan terjadi Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat, dengan demikian hipotesis pertama terbukti.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

<sup>56</sup> R.Z. Leirissa, *op.cit.*, hlm. 102.

### BAB III

#### PEMBERONTAKAN PRRI DI SUMATERA BARAT

#### TAHUN 1958-1961

##### A. Proklamasi Berdirinya PRRI

Sikap rezim<sup>57</sup> terhadap percobaan makar tidak sama dan memang tidak dapat diharapkan sama. Rezim Sukarno sejak awal bersikap tegas yaitu menumpas setiap usaha makar atau pemberontakan. Mulai dari pengkhianatan partai komunis (PKI) di Medan tahun 1948, Sukarno menghadapi setiap kekacauan dengan kekuatan tentara. Pemberontakan-pemberontakan selanjutnya mengalami nasib yang sama, seperti Dr. Soumukil di Maluku, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Kartosoewiryo di Jawa Barat dan Daud Berueh di Aceh.<sup>58</sup>

Peristiwa pengambilalihan kekuasaan Sumatera Tengah pada tanggal 20 Desember 1958 merupakan awal dari pergolakan daerah di Sumatera. Pengalihan kekuasaan dari tangan Gubernur Ruslan Mulyoharjo kepada Ketua Dewan Banteng yaitu Letkol Ahmad Husain.<sup>59</sup> Sukarno sebagai presiden secara cepat, dengan bantuan Jendral Nasution, Sukarno mengirim kekuatan militer (darat, laut dan udara) untuk menumpas PRRI. Pemberontakan PRRI yang sayap militernya dipimpin oleh Ahmad Husein menyatakan bahwa yang didirikan adalah

---

<sup>57</sup> Setiap rezim mempunyai watak sendiri-sendiri yang umumnya ditentukan oleh watak pemimpinnya.

<sup>58</sup> *Harian Singalang*, Minggu 19 Desember 1999.

<sup>59</sup> Naskah penyerahan yang sudah ditandatangani, maka kekuasaan militer maupun kekuasaan sipil berada ditangan Letkol Ahmad Husain. Ketika Dewan Banteng mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang tanggal 15 Februari 1958.

pemerintahan tandingan, bukan negara baru. Kelompok ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan Sukarno yang pada waktu itu secara terang-terangan merangkul PKI untuk duduk dalam kabinet. Sukarno dalam kinerjanya juga telah melenceng dari ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) yang berlaku dengan menunjuk dirinya sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia, padahal ketika itu dia adalah Presiden yang bukan mengepalai pemerintahan.

Memasuki tahun 1958 berlangsung serangkaian pertemuan di Sungai Dareh, sebuah kota kecil yang terletak agak ke Tenggara Sumatera Barat.<sup>60</sup> Hadir dalam pertemuan itu tokoh-tokoh militer dan politik seperti; Kolonel Simbolon, Kolonel Zulkifli Lubis, Letkol Ahmad Husein, Letkol Barlian, Letkol Ventje Sumual, Kolonel Dahlan Djambek, Sjafruddin Prawiranegara, M. Natsir, dan Soemitro Djojohadikusumo.<sup>61</sup> Pertemuan itu berlangsung sejak tanggal 9 sampai dengan 13 Januari 1958. Di sinilah tokoh-tokoh politik memperlihatkan pengaruhnya secara jelas. Kehadiran tokoh-tokoh Masyumi dan PSI dalam pertemuan itu bukan sekedar meramaikan pasar, tetapi berperan sangat besar dalam merumuskan tuntutan yang kemudian dihasilkan dalam pertemuan itu.<sup>62</sup>

Dilihat dari urutan peristiwa, jelaslah apa yang diputuskan di Sungai Dareh merupakan kelanjutan Piagam Palembang,<sup>63</sup> sedangkan Piagam Palembang merupakan perluasan tuntutan Dewan Banteng. Pertemuan di Sungai Dareh menghasilkan keputusan yang sangat ekstrim, yaitu akan mendirikan pemerintahan tandingan jika tuntutan sebelumnya tidak dipenuhi.

---

<sup>60</sup> Lihat lampiran. No.1.

<sup>61</sup> Tentang foto tokoh-tokoh teras PRRI. Lihat lampiran. No.2.

<sup>62</sup> Soewardi Idris, *op.cit.*, hlm. 13-14.

<sup>63</sup> Lihat lampiran. No. 3.

Bulan Januari 1958 senjata-senjata mulai berdatangan ke Sumatera Tengah melalui *dropping* dari pesawat udara di tengah malam buta. Di Padang, senjata-senjata itu dijatuhkan di lapangan udara Tabing, tidak jauh dari kota Padang. Sejak saat itu setiap perwira militer Sumatera Tengah, baik yang lama maupun yang baru diaktifkan kembali dengan dilengkapi dua pucuk senjata api, sebuah pistol dan sebuah senapan rimba (*jungle rifle*). Untuk memperbesar jumlah personil militer, mereka yang dulu pernah menjadi anggota Devisi Banteng dipanggil kembali dan dipersenjatai. Mereka memperoleh pangkat terakhir yang dulu pernah mereka sandang.<sup>64</sup>

Mahasiswa dan pelajar serta para pemuda dilatih untuk menggunakan senjata. Sepintas lalu, orang akan terkesan bahwa tidak mudah menghancurkan kekuatan Dewan Banteng.<sup>65</sup> Pada tanggal 8 Februari direncanakan suatu rapat raksasa di Padang, namun rencana itu batal karena hujan lebat. Rapat itu diundur sampai tanggal 10 Februari yang dihadiri ribuan penduduk kota Padang.

Rapat yang berlangsung di halaman kediaman Gubernur Sumatera Tengah benar-benar dapat dianggap sebagai rapat raksasa melihat dari banyaknya yang hadir. Dalam rapat itu terjadi peristiwa yang menarik perhatian, dalam pidato Ahmad Husein mencopot tanda pangkat dan melemparnya kepada pengunjung.

---

<sup>64</sup> Soewardi Idris, *op.cit.*, hlm. 14.

<sup>65</sup> Audrey R. & George Mc. T. Kahim, *Supversi Sebagai Politik Luar Negeri, Menyikapi Keterlibatan CIA di Indonesia*. 1997, Jakarta Grafiti, hlm. 187. Baca juga Singgalang tanggal 4 Februari 2000, "Saat Meriam Sukarno Diarahkan ke Kota Padang, 400 Mahasiswa Beri Dukungan Pada PRRI". Lihat juga Wawancara J.R. Chaniago dengan Ahmad Husein tanggal 28 April 1980 di Jakarta, (Koleksi Arsip Nasional, kaset ke VII)

Husein mengesankan bahwa ia ikut Dewan Banteng bukan untuk mengejar pangkat, tetapi untuk membangun daerah. Tanda pangkat itu dipasang lagi oleh pendukungnya. Peristiwa ini diiringi sorak-sorai pengunjung dengan rasa simpati yang amat dalam. Tokoh ini juga dapat membakar emosi pengunjung dengan pidato berapi-api.

Dengan pantun, Husein juga hendak menunjukkan kepincangan antara pusat dan daerah. Di pusat orang basah kuyup oleh kesenangan dan kemewahan, tetapi di daerah kering kerontang. "Di langit yang hujan di bumi setetes tiada". Pantun memang bentuk puisi yang mudah menyentuh lubuk hati orang Minang, Ahmad Husein rupanya memahami hal tersebut. Suara pengunjung membahana ke udara disertai tepuk tangan manakala mendengar pantun itu diucapkan.<sup>66</sup>

Dalam pertemuan di Sungai Dareh mereka membentuk Dewan Pejuang yang terdiri atas 11 orang militer dan 5 orang sipil. Dalam rapat umum itulah disampaikan ultimatum kepada Kabinet Djuanda dan Presiden Sukarno. Dewan Pejuang yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein mengumumkan keputusan sidang pada pukul 10:00 WIB yang berbunyi:<sup>67</sup>

1. Supaya dalam waktu 5 kali 24 jam semenjak tuntutan itu diumumkan :
  - a. Kabinet Djuanda mengembalikan mandatnya kepada Presiden/pejabat Presiden, atau ;
  - b. Presiden/Pejabat Presiden mengambil kembali mandat Kabinet Djuanda.
2. Segera setelah tuntutan itu tersebut dalam angka satu dilaksanakan supaya Hatta dan Hamengkubuwono ditunjuk untuk membentuk satu zaken kabinet nasional menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, yang terdiri dari tokoh-tokoh yang sudah terkenal, pemimpin yang jujur, cakap, dan disegani serta bersih dari anasir-anasir anti-Tuhan.

---

<sup>66</sup> Soewardi Idris, *op.cit.*, hlm.16.

<sup>67</sup> Untuk lebih jelasnya lihat lampiran. No.4.

Tuntutan lain yang merupakan bagian ultimatum itu adalah agar Sukarno kembali menjadi Presiden konstitusional. Sekiranya ultimatum ini tidak dipenuhi, maka Ahmad Husein menyatakan tidak terikat lagi oleh pemerintah pusat. Ahmad Husein dan rekan-rekannya menempuh jalan sendiri untuk melaksanakan cita-cita perjuangannya. Pengunjuk rapat umum yang jumlahnya ribuan mengebu-gebu, seakan-akan siap ke medan pertempuran malam itu juga.<sup>68</sup>

Keesokan harinya, tanggal 11 Februari 1958, Perdana Menteri Djuanda mengadakan sidang kabinet yang dihadiri juga oleh KSAD Nasution, KSAL Subiyakto, KSAU Suryadarma, dan Sekjen Kementerian Pertahanan Kolonel Hidayat. Kabinet dengan tegas menolak ultimatum Husein sebagai pimpinan dewan pejuang. Di samping itu, dikeluarkan pula surat pemecatan dari dinas tentara terhadap Letkol Ahmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Djambek, dan Kolonel Maludin Simbolon.<sup>69</sup> Penolakan ultimatum itu seperti sudah dapat diduga sebelumnya akan berakibat fatal. Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan (gabungan dewan-dewan di daerah bergolak) mengambil langkah berikutnya.<sup>70</sup>

Pada tanggal 15 Februari 1958 diproklamasikan berdirinya sebuah pemerintahan tandingan dengan nama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sebagai jawaban atas ultimatum yang tidak ditanggapi oleh

---

<sup>68</sup>Soewardi Idris, *op.cit.*, hlm. 17.

<sup>69</sup> lihat lampiran. No.5.

<sup>70</sup> Soewardi Idris, *op.cit.*, hlm. 18. Lebih jelasnya lihat lampiran. No. 6.

pemerintah pusat. Susunan kabinet PRRI diumumkan di Bukittinggi, Sumatera Tengah, pukul 22.30, dengan Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri<sup>71</sup>

### **B. Keterlibatan Amerika Serikat dan Sekutunya.**

Hubungan bilateral Amerika Serikat dan Indonesia merupakan hubungan dua negara yang menarik untuk dipelajari sebelum dibicarakan keterlibatan Amerika Serikat dalam sistem percaturan politik di Indonesia. Hubungan kedua negara tersebut memiliki sifat yang unik, keunikan ini disebabkan pada suatu saat hubungan kedua negara tersebut sangat begitu erat, akan tetapi di lain waktu hubungan kedua negara tersebut menjadi sangat tegang. Hal ini terutama bila ada masalah-masalah yang sangat sensitif yang berkaitan dengan politik dalam negeri kedua negara. Walaupun harus diakui bahwa dari pihak Amerika Serikat ada perasaan takut atau was-was akan adanya ancaman komunis yang berkembang di Indonesia.<sup>72</sup> Inilah salah satu alasan atau titik tolak dari mengapa Amerika Serikat selalu ikut campur dalam urusan politik dalam negeri Indonesia khususnya dalam era pergolakan daerah pasca kemerdekaan di beberapa wilayah di Indonesia.

Politik internasional, khususnya berkecamuknya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, yang masing masing blok saling berebut pengaruh terhadap negara-negara Asia Afrika untuk membangun kekuatan di dunia yang dapat mendukung tercapainya cita-cita mereka. Masing-masing berkeinginan agar Indonesia ada di pihaknya, dan sekurang-kurangnya Indonesia tidak berpihak pada blok lawan. Dengan berkembangnya PKI yang semakin besar di Indonesia,

---

<sup>71</sup> Audrey R. & George Mc. T. Kahim, *op.cit.*, hlm. 203.

<sup>72</sup> Hadi Soebadio, *op.cit.*, hlm.160.

Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat cukup merasa khawatir terhadap masa depan Indonesia. Sikap *John Foster Dulles* sebagai Menteri Luar Negari Amerika Serikat sangat jelas dan tegas, “siapa yang tidak berpihak kepada Amerika Serikat adalah musuh Amerika Serikat”. Suatu sikap yang amat picik bagi pelaksanaan politik internasional bagi negara sebesar Amerika Serikat, untuk keadaan waktu itu. Sikap yang demikian diperkuat oleh saudaranya yang menjadi Direktur CIA atau badan Intelijen Pusat AS, yaitu *Allan Dulles*. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa Amerika akan mendukung bahkan memberikan bantuan kepada mereka yang melawan PKI dan bahkan pemerintahan RI. Sebaliknya Uni Soviet sangat jelas akan mendukung gerakan-gerakan PKI dan kawan-kawanya. Dengan demikian, fakta politik dalam negeri ataupun internasional itu mempunyai dampak besar terhadap terjadinya Pemberontakan PRRI Sumatera Barat.<sup>73</sup>

Dukungan Amerika Serikat tidak hanya terbatas pada simpati terhadap para pemberontak di Sumatera, bahkan secara nyata memberi dukungan secara fisik. Bersama-sama sekutunya yang ada di Asia Timur mereka turut serta membantu pemberontakan yang sedang bergolak di Indonesia. Amerika Serikat mendesak sekutunya seperti: Filipina, Taiwan, Thailand dan Korea Selatan memberikan bantuan personil dan senjata. Sedangkan sekutu Inggris seperti: Singapura, Malaya (Malaysia yang belum terbentuk) dan Australia, didesak agar ikut aktif juga.<sup>74</sup> Keterlibatan Amerika Serikat dalam wadah struktur organisasi CIA terhadap Pemberontakan PRRI dapat dilihat dengan memberikan bantuan senjata dan keuangan. Bahkan dijelaskan oleh Kolonel M. Simbolon pada bulan Oktober,

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 196-197.

organisasi CIA telah memberikan bantuan, dan dalam waktu lima bulan telah menyerahkan senjata untuk 8000 orang kepada pemberontak.<sup>75</sup>

Bantuan tersebut akan disalurkan melewati pelabuhan Dumai dan Painan yang terletak sekitar 50 km Selatan Padang (Sumatera Barat). Juga digunakan pesawat terbang Ampibi Catalina yang mendarat di danau Singkarak di Sumatera Barat. Kapal selam dan pesawat terbang dimanfaatkan untuk mengangkut personil PRRI keluar negeri, untuk memperoleh latihan di Singapura, Thailand, dan Malaya. Pesawat-pesawat terbang tersebut singgah di Changi atau terbang langsung ke tujuan. Amerika Serikat dan Inggris mengadakan intervensi dengan membantu pemberontak tersebut. Menurut Kol. M. Simbolon masalah bantuan persenjataan dari CIA dapat digambarkan sebagai berikut:

“Selesai rapat di Sungai Dareh, Letkol. Ventje Sumual dan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo berangkat ke Singapura. Pada suatu ketika mereka sedang makan di sebuah restoran, seorang yang belum dikenal mereka orang tersebut menawarkan sejumlah senjata. Sungguh mengherankan, karena senjata itu tidak perlu dibeli dan akan diberikan cuma-cuma“.<sup>76</sup>

Pada saat yang sama, Samuel mengaku bahwa para pemimpin Permesta telah mengadakan hubungan dengan pihak Amerika Serikat. Samuel mengatakan “Sayalah yang mengadakan hubungan, saya mengadakan bukan sebagai seorang pemimpin Permesta, tetapi sebagai seorang yang bertekad melakukan perlawanan bersenjata melawan pemerintah pusat sesuai dengan kesepakatan Sungai Dareh“. Barang kali dapat dikatakan di sini, bahwa PRRI adalah konvergensi dari dua bentuk kepentingan. Pihak pertama adalah daerah-daerah yang kaya akan sumber

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

<sup>76</sup> Payung Bangun, *op.cit.*, hlm.225.

daya alam tetapi penduduknya tidak dapat menikmatinya dan menyalahkan keadaan itu kepada pemerintah pusat serta munculnya kekuatan komunis yang memiliki program ekonomi yang membahayakan. Sedangkan pihak kedua, adalah Amerika Serikat yang melihat meningkatnya kekuatan komunis di Indonesia sebagai ancaman bagi mekanisme pasar bebas sebagai bentuk ekonomi yang bisa menjamin kesejahteraan umat manusia dengan tujuan utama adalah membendung sepak terjang komunis.

Kepentingan luar atau kepentingan kedua ini diwakili oleh AS, yang ingin mempertahankan sistem ekonomi bebas dengan jalan membendung komunisme yang dianggap membawa konsep ekonomi komando yang dapat merusak kepentingan negara Amerika Serikat sendiri. Tradisi Amerika Serikat adalah demokrasi dan kapitalisme. Hanya sedikit saja di antara golongan liberal dan golongan kiri Amerika Serikat yang benar-benar menghendaki dihapusnya kapitalisme, walaupun sebenarnya banyak di antara kedua golongan itu tidak bergairah menyambut kehadiran kapitalisme.

### **C. Operasi Militer Penumpasan Pemberontakan PRRI**

Setelah Presiden Sukarno kembali ke Jakarta dari lawatannya ke luar negeri, Sukarno menyatakan; “Kita harus menghadapi penyelewengan pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang itu dengan tegas dan dengan segala kekuatan yang ada pada kita”. Pada dasarnya Presiden Sukarno menyokong rencana P.M. Ir. Djuanda dan KSAD Mayjen A.H. Nasution untuk menggunakan kekerasan senjata.

Kabinet Djuanda juga mengeluarkan perintah untuk menangkap Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan Soemitro Djojohadikusumo.

Sukarno mempunyai keyakinan bahwa pemberontakan akan dapat diakhiri dalam waktu singkat. Persiapan memang sudah dilakukan, mula-mula daerah Riau-lah yang harus diselamatkan, karena daerah itu terdapat kilang minyak Caltex milik Amerika Serikat. Jika kilang-kilang minyak itu tidak dapat diamankan, maka kemungkinan besar Amerika Serikat akan ikut campur tangan untuk menyelamatkan kekayaannya.<sup>77</sup>

Pada tanggal 19 Februari 1958 Wakil Presiden RI Hatta bertemu langsung dengan Presiden Sukarno. Dalam pertemuan tersebut Hatta mengajak kepada Sukarno untuk menyelesaikan konflik secara damai. Hatta berpendapat bahwa masalah PRRI harus diselesaikan dengan jalan damai atau perundingan dan bukan dengan tindakan militer. Namun, usaha dari Hatta tersebut ternyata gagal. Pada tanggal 20 Februari perintah untuk melakukan operasi militer gabungan secara terbuka bergulir ke Jakarta. Keputusan melaksanakan operasi militer diambil sehubungan berakhirnya ultimatum pemerintahan pusat kepada PRRI untuk menyerahkan diri.

Dua pesawat B-25 dengan penerbang Kapten Sri Muljono dan Mayor Soetopo mendapat perintah menyebarkan pamflet yang berisi himbauan agar PRRI menyerah. Sebelum menuju daerah tujuan, kedua pesawat mendarat di

---

<sup>77</sup> Soewardi Idris, *op.cit.*, hlm. 18.

Astrat Setra (lampung) agar tidak diketahui Letkol Berlian selaku Komando Sumatera Selatan. Keesokan harinya kedua pesawat terbang menyusuri pantai Barat Sumatera. Setelah terbang hampir dua jam, mereka memasuki pantai Padang dan mulai menyebarkan Pamflet.<sup>78</sup>

Tanggal 22 Februari KSAD A.H. Nasution dalam pengarahannya kepada jajaran perwira di Jakarta menyatakan telah siap menggunakan wewenangnya untuk mengerahkan pesawat tempur secara besar-besaran ke Sumatera. Dalam aksi ini Nasution juga menyampaikan himbauan kepada seluruh perwira dan prajuridnya “bahwa mereka yang hendak menyetujui tindakan berdirinya PRRI dipersilahkan berhenti dari angkatan perang”. Tanggal 11 Maret 1958 rapat rahasia Menlu negara SEATO (*South East Asia Treaty Organization*) di Manila diselenggarakan dengan tokoh-tokoh PRRI. Pertimbangan untuk memberikan *belligerent status* (status negara yang sedang berperang) kepada PRRI, status demikian memungkinkan daerah-daerah lain dapat memberikan bantuan terbuka kepada PRRI. Menteri Luar Negeri Australia Robert Casey berpendirian keras, menghendaki pesawat-pesawat Australia yang beroperasi di Indonesia untuk melakukan tindakan menghambat ekonomi Indonesia. Namun, gagasan tersebut tidak disetujui oleh Menteri Pertahanan Australia.<sup>79</sup>

Pada bulan Maret 1958 Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) melancarkan serangan besar-besaran untuk menumpas Pemerintahan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 205.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, serangan dilancarkan lewat udara, laut dan darat. Tokoh bangsa seperti Dr. Mohammad Hatta telah mencoba menyakinkan pemerintah pusat bahwa tindakan kekerasan tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Serangan bersenjata hanya akan mengobarkan dendam dan menghancurkan persatuan dan kesatuan. Akan tetapi, himbauan untuk tidak melakukan kekerasan tidak mendapat tanggapan.<sup>80</sup>

Ada beberapa alasan menurut pemerintah pusat, mengapa tindakan kekerasan itu dilakukan. Ketika itu Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah duduk dalam kabinet. PKI terus mendesak agar PRRI ditumpas sampai ke akar-akarnya. Nasution yang ketika itu menjadi Staf Angkatan Darat (KSAD) tidak mungkin membiarkan PRRI, karena salah satu tuntutan PRRI ialah agar pimpinan AD diganti, secara langsung Nasution terancam.<sup>81</sup> Lagi pula sebagai pendukung kabinet Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunis), Nasution harus mendukung pula penggagas kabinet itu, yaitu Sukarno.<sup>82</sup> Pelaksanaan Nasakom dipaksakan oleh Sukarno sedemikian rupa. Sukarno sepertinya larut dalam pemikiran bahwa suatu saat pihak yang berkuasa bisa melaksanakan kehendaknya kepada pihak penentang dengan memaksa mereka untuk patuh. Hal ini seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Gramski, sebagai dikutip dari Hikam oleh Emizal Amri, bahwa melalui hegemoni (kekuasaan) ideologis, kepatuhan bisa

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

<sup>81</sup> Lihat lampran. No.3. Tentang Piagam Palembang.

<sup>82</sup> Pemikiran tentang penyatuan tiga paham yang berbeda dalam wujud Nasakom sebenarnya telah dimulai Sukarno ketika masih berstatus mahasiswa. Dalam sebuah tulisannya di surat kabar *Suluh Indonesia Muda Tahun 1926*, Sukarno menulis. "Dengan djalan koerang sempoerna, kita menjtoba memboektikan, bahwa faham nasionalisme, Islamisme, dan Masxisme itoe dalam negeri djadjahan pada beberapa bagian menoetoepepi satoe sama laian".

dipaksakan, dan perlawanan bisa dilenyapkan oleh kelompok elit.<sup>83</sup> Maka sejak Februari 1958 sampai 1961, perang saudara berkobar di Sumatera Barat dan Tapanuli. Korban berjatuhan terutama korban jiwa di kalangan rakyat dan musnahnya harta benda mereka.<sup>84</sup>

Pada tanggal 12 Maret 1958 dimulai operasi militer di Riau yang disebut Operasi Tegas. Operasi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Pada hari itu juga Pekanbaru berhasil dikuasai. Mereka merebut Bandara Simpang Tiga dari pemberontak dan menemukan banyak senjata mutahir buatan AS yang masih tersimpan dalam peti, yang baru saja dijatuhkan dari pesawat terbang untuk membantu PRRI. Gaung Operasi Tegas segera terasa di Padang, orang mulai berbondong-bondong meninggalkan kota seraya membawa barang-barang berharga milik mereka. Kota Padang mulai mendapat serangan dari udara, terutama untuk membungkam RRI (stasiun radio) di Padang dan Bukittinggi. Serangan udara ini sekaligus sebagai pertanda bahwa sebuah pertarungan berdarah segera akan dimulai.<sup>85</sup>

Kegiatan pasukan PRRI mulai terlihat di puncak Gunung Padang menghadap ke laut, dibangun sebuah kubu yang dipersenjatai sebuah meriam. Sementara itu kota Padang mulai berangsur-angsur sepi, penduduk dan pedagang mulai meninggalkan kota mencari tempat yang lebih aman di luar kota. Pada tanggal 16 Maret 1958 radio RRI Padang memberitakan bahwa Medan berhasil

---

<sup>83</sup> Emizal Amri, *Indonesia di bawah Sistem Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin (1950-1965)*, Padang, FPIPS IKIP, 1998, hlm. 26

<sup>84</sup> Soewardi Idris, *op.cit.*, hlm. 18. Untuk lebih jelasnya terdapat dalam lampiran. No. 9. Tebel: 1.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

dikuasai pemberontak, dan sekitar 2000 pasukan di Sumatera telah membelot dan siap menghadapi datangnya serbuan pasukan APRI dari Jawa. Tanggal 20 Maret seluruh Riau daratan praktis telah dikuasai APRI. Ahmad Husein mengirim tiga kompi pasukan DBI X untuk menahan gerak laju APRI memasuki Sumatera Barat.<sup>86</sup>

KSAD Mayjen A.H. Nasution selaku pejabat Penguasa Perang Pusat merencanakan dan menetapkan Operasi 17 Agustus untuk menghancurkan pemberontak di Sumatera Barat. Rencananya pada tanggal 17 April 1958 ditetapkan sebagai hari H Operasi 17 Agustus. Tanggal 7 April Panglima TT I, Letkol Djamin Ginting melancarkan Operasi Bukit Barisan II di Wilayah Sumatera Utara yaitu di Medan, untuk menghadapi gerakan pemberontak Mayor Boyke Nainggolan di Medan. Operasi ini berhasil mendesak pasukan Nainggolan dan Sinta Pohan mundur dari Tapanuli. KSAD Nasution bersama KSAL dan KSAU berhasil menyusun satu komando Operasi Gabungan yang diberi nama Operasi 17 untuk menumpas Pemberontakan PRRI.<sup>87</sup>

Rombongan pertama pasukan APRI diberangkatkan dari Tanjung Priok menuju Sumatera Barat dengan Armada Kapal Laut. Pasukan APRI yang ditugaskan menguasai kembali Sumatera Barat ini dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Lima hari setelah Pekanbaru berhasil dikuasai, tibalah giliran Kota Padang. Pada tanggal 16 April 1958 dalam jarak sekitar 22 km dari pantai Padang, terlihat

---

<sup>86</sup> Mengenai jumlah korban di daerah Operasi Kodam II/17 Agustus (Sumatera Barat/Riau). Lihat lampiran. No. 9. Tebel: 2.

<sup>87</sup> Tentang kekuatan Operasi 17 Agustus, lihat lampiran. No. 9. Tabel: 3.

iring-iringan kapal pengangkut pasukan APRI. Kapal-kapal itu berkumpul di sekitar pulau Pandan yang dikawal oleh kapal perang Gajah Mada dan dipimpin oleh Letkol (L) John Lie. Namun, operasi yang sesungguhnya baru dimulai keesokan harinya tanggal 17 April 1958. Kapal perang Gajah Mada membuka tembakan dengan meriam-meriam untuk mengamankan daerah pendaratan.

Pukul 06.30 WIB dimulailah pendaratan pertama oleh KKO, beberapa saat kemudian pasukan payung diterjunkan di lapangan Udara Tabing yang penuh ranjau. Perlawanan mati-matian yang diperkirakan akan diberikan oleh pasukan PRRI, ternyata tidak terjadi. Pasukan APRI dengan nama sandi Operasi 17 Agustus mendarat di pantai Padang tanpa mendapat perlawanan berarti dari pasukan PRRI, umumnya pasukan PRRI telah mundur keluar kota, seperti ke Solok, Painan, Padang Panjang, Bukittinggi, atau ke Pariaman. Pada hari itu juga kota Padang dapat dikuasai penuh oleh pasukan APRI, karenanya Ibu Kota PRRI dipindah ke Bukittinggi.<sup>88</sup>

Kapal-kapal APRI merapat di Padang dan menurunkan persenjataan bantuan, Kaveleri, Artileri, Zeni Pioneer, Batalyon Perhubung, Detasemen Polisi Militer, Kompi Kesehatan, dan Kompi Intendens. Pada tanggal 24 April 1958 Operasi Saptamarga digelar di daerah Tapanuli Sumatera Utara untuk menghancurkan pasukan PRRI yang berpusat di Tapanuli serta memutuskan hubungan dengan PRRI Sumatera Utara. Setelah tiga hari pelaksanaan, tepatnya

---

<sup>88</sup> Soewardi Idris, *op.cit.*, hlm. 20.

tanggal 27 April 1958, Operasi Sapta Marga berhasil menguasai Sibolga dan Tarutung.

Ahmad Husein sendiri pindah ke daerah Kabupaten Solok. Persiapan di kabupaten ini memang sudah dilakukan sejak beberapa hari, Husein memilih Kabupaten Solok bukan secara kebetulan. Sebelum Agresi Militer Belanda yang kedua, Husein pernah bermarkas di Solok memimpin Batalyon Harimau Kuranji mundur keluar kota dan bergerilya sampai Belanda angkat kaki. Dengan kata lain, Husein mengenal betul medan kabupaten Solok. Daerah tersebut kaya akan beras dan hutan-hutannya sangat lebat, sehingga dengan mudah melancarkan perang gerilya dari daerah tersebut.<sup>89</sup>

Ahmad Yani sebagai pimpinan Komando Pasukan APRI menyadari kenyataan ini. Ahmad Yani tahu mengapa Husein mengundurkan diri ke Solok, maka daerah Solok harus dibenahi lebih dahulu. Pada Agresi Militer Belanda yang kedua, Belanda merebut Solok dari dua arah; pertama, menurunkan pasukan di Danau Singkarak (20 km di utara Solok), dan menyerang Solok dengan pasukan infantri dari Lubuh Selasih (21 km dari Solok, 40 km dari Padang). Sebelumnya kota Solok ditembaki dari udara dan PRRI memperkirakan bahwa pola ini akan ditiru oleh Yani. Solok memang mendapat tembakan dari udara, tetapi pasukan infantri tidak langsung dari Padang ke Solok, mereka mengambil jalan ke arah kanan dari Lubuk Selasih dan menduduki Alahan Panjang. Setelah Alahan Panjang diduduki, barulah pasukan lain dari Padang menduduki Solok

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

melalui Lubuk Selasih. Dengan demikian, Solok terancam dari dua arah yaitu Alahan Panjang dan Lubuk Selasih.<sup>90</sup> Ketika iring-iringan kendaraan APRI bergerak dari Lubuk Selasih ke arah Solok. Di pintu gerbang kota Solok, pecahlah tembakan-tembakan baik dari pasukan APRI maupun dari PRRI sendiri, tetapi tidak ada satu jam tembakan itu berhenti kota Solok yang memang tidak dipertahankan dengan cepat mampu dikuasai pasukan APRI.

Ketika Padang jatuh ke tangan APRI pada tanggal 17 April 1958 Ibu Kota PRRI pindah ke Bukittinggi. Kota ini tidak langsung diserang oleh Ahmad Yani, pasukan dari APRI hanya menduduki daerah di sekitarnya. Baru pada tanggal 4 Mei 1958 Bukittinggi mulai diserang, namun sebelum diserang kota ini sudah ditinggalkan, sehingga untuk menguasai daerah ini pasukan dari Ahmad Yani tidak mendapatkan perlawanan sedikitpun. APRI masuk ke Bukittinggi bagaikan memasuki kota terbuka (*open city*). Mulai saat itu boleh dikatakan seluruh pasukan PRRI sudah mengambil posisi di bukit-bukit, pegunungan, hutan, dan ladang-ladang, atau desa-desa jauh dari kota, perlawanan selanjutnya merupakan perlawanan dengan perang gerilya. Meskipun kota-kota di seluruh Sumatera Tengah telah dikuasi oleh APRI, tetapi secara berangsur-angsur PRRI mencoba menyusun sendiri kesatuan-kesatuan yang sudah berantakan, baik dalam kesatuan kecil maupun kesatuan setingkat batalyon sampai resimen. Di samping itu, telah dikonsolidasikan pula penguasa-penguasa territorial, tetapi konsolidasi itu tidak semudah apa yang diinginkan.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> *Idem*

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.

Pada tanggal 10 Mei 1958 Presiden Sukarno melalui Kepres No. 363/M/1958 dan Perdana Menteri Djuanda serta Menteri Dalam Negeri mengangkat Kaharuddin Dt. Rangkyo Basa sebagai Pejabat Gubernur atau Kordinator Pemerintahan Sipil Sumatera Barat. Upaya Kedutaan Besar Amerika Serikat pada tanggal 15 Mei, agar diadakan gencatan senjata antara pemberontak dengan pemerintah ditolak oleh P.M. Djuanda dan Presiden Sukarno. Pemerintah mengeluarkan pengumuman resmi yang menyebutkan bahwa perundingan hanya akan dipertimbangkan setelah kaum pemberontak menyerahkan diri dengan tidak bersyarat. Kementerian Penerangan menyatakan politik pemerintah adalah menumpas kaum pemberontak dan tidak melalui perundingan.<sup>92</sup>

Surat Keputusan dari Presiden (Keppres) No.1/1958 tentang pembentukan kembali Pemerintahan Sipil Sumatera Barat oleh Misi Hardi pada tanggal 17 Mei. Surat Keputusan ini berisi pernyataan bahwa kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan sipil diserahkan kepada pejabat gubernur, yang selanjutnya akan melaksanakan koordinasi dengan jawatan/instansi pusat yang ada di Sumatera Barat. Kekuasaan dan kewajiban yang sama juga diberikan kepada para Bupati dan Walikota. Selain itu, SK juga berisi himbauan kepada pegawai yang ikut memberontak yang masih berkeinginan bekerja di instansi asalnya untuk kembali mendaftarkan diri sampai pada tanggal 31 Mei 1958. Pada tanggal 28 Juli 1958 Perdana Menteri RI. Ir. Djuanda dalam sidang Pleno mengatakan bahwa

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

pemerintahan pusat telah mengambil tindakan dan melakukan usaha-usaha untuk menumpas Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat.<sup>93</sup>

Pada tanggal 10 Februari 1959 seluruh tokoh militer dan sipil PRRI berkumpul di Bonjol, untuk memperingati hari ulang tahun (HUT) pertama PRRI. Upacara resmi itu ditandai dengan pengibaran bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesai Raya. Ahmad Husein dan Sjafruddin Prawiranegara menyampaikan pidato yang menyatakan tetap konsisten dengan perjuangan mereka.

Bulan April 1959 status Komando Operasi 17 Agustus diubah menjadi Komando Teritorial setingkat komando daerah militer dan dinamakan Kodam 17 Agustus. Pengubahan status dilakukan menimbang berbagai keberhasilan yang telah dicapai dalam menumpas PRRI sejak operasi dimulai setahun sebelumnya. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit pembubaran badan konstituante dan memerintahkan untuk kembali ke UUD 1945.<sup>94</sup> Dengan berlakunya kembali UUD 45, maka kabinet Djuanda (kabinet karya) dibubarkan terhitung tanggal 10 Juli 1959. Kemudian, dibentuk Kabinet Kerja I dengan perdana menteri adalah Sukarno sendiri, sedang Ir. Djuanda ditunjuk sebagai

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>94</sup> Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 secara konstitusional yang dengan melalui Konstitusi dan rentetan peristiwa- peristiwa politik yang mencapai klimaknya pada bulan Juni 1949, akhirnya mendorong Presiden Sukarno untuk sampai pada kesimpulan bahwa telah timbul keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan negara, nusa dan bangsa serta merintanngi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Demikian demi keselamatan negara, pada hari Minggu tanggal 5 Juli jam 17.00, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka diumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran badan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka demokrasi terpimpin.

menteri pertama. Dalam pidatonya menyambut HUT RI Presiden Sukarno memperkenalkan sistem pemerintahan yang baru tentang Manipol dan secara sepihak Sukarno membubarkan Masyumi.<sup>95</sup>

Tahun 1959 yang dipenuhi dengan kegoncangan politik dalam negeri juga ditandai dengan pertempuran-pertempuran yang bersifat gerilya, dan merupakan tahun yang sangat mengguncangkan keuangan pihak PRRI. Pada tahun ini, pemerintah pusat di Jakarta menarik uang yang sedang beredar dan menggantinya dengan uang baru.<sup>96</sup> Kebijakan ini merepotkan PRRI, karena mereka juga menyiapkan uang yang cukup banyak yang diambil dari bank-bank pemerintahan di Sumatera Tengah. Kini uang tersebut harus diganti dengan uang baru dan harus ditukar di kota. Tentu saja kalau uang tersebut dibawa ke kota kemungkinan besar dapat disita oleh APRI. Akhirnya pemimpin PRRI Ahmad Husein menempuh suatu kebijaksanaan, yaitu mencap uang tersebut dengan stempel divisi banteng, kemudian menandatangani sendiri (bukan cap tanda tangan). Sesudah uang di cap dan ditandatangani uang itu dapat beredar lagi. Berkarung-karung uang yang ada di dalam masyarakat yang dikirim ke COP, markas Husein. Uang itu dikembalikan kepada pemilik melalui penguasa PRRI setempat. Anehnya, sampai sekian jauh mekanisme ini dapat berjalan dengan baik, kecuali kalau si pemilik masuk kota. Uang itu tidak mendapat sambutan di kalangan masyarakat yang enggan menerimanya dan pada akhirnya orang tidak percaya lagi pada uang tersebut.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Soewardi Idris, *op.cit.*, hlm. 112-113.

<sup>96</sup> Lihat di lampiran. No. 7. Gambar: 1.

<sup>97</sup> Soewardi Idris, *op.cit.*, hlm. 50.

Dengan maksud untuk dapat keluar dari kesulitan, pada akhir tahun 1959, Sjafruddin mengeluarkan uang PRRI seperti yang dilakukan pada waktu pemerintahan darurat yang dipimpinnya di masa agresi Belanda dahulu.<sup>98</sup> Nasib uang itu juga menyedihkan, karena orang tidak akan menerimanya dengan senang hati. Masyarakat tahu bahwa uang tersebut dikeluarkan tanpa jaminan apa-apa. Selain pergantian uang, sebagai langkah pengamanan yang dilakukan APRI dengan jalan memasang papan nama di setiap rumah yang anggotanya terlibat pemberontakan. Papan nama itu cukup mencolok, di atasnya tulisan putih dengan dasar hitam diberi tanda palangan seperti hurup fX, dan di bawahnya ditulisi nama-nama keluarga yang ikut PRRI. Hal ini akan memudahkan pengontrolan dan merupakan gagasan yang sangat baik untuk meningkatkan pengamanan. Pemerintah pusat juga mengevaluasi mata uang rupiah dari: Rp 1,000,- menjadi Rp 100,-; *banknotes* lebih dari Rp 25,000,- di-*demonetized*. Dengan kebijaksanaan ini pemerintah mulai memindahkan etnis Cina dari pedesaan ke kota-kota besar. Sebanyak 100.000 orang meninggalkan Indonesia menuju Republik Rakyat Cina dalam setahun ke depan; di samping sebanyak 17.000 orang untuk Taiwan.<sup>99</sup>

Bulan September 1959 pemerintahan pusat mengumumkan bahwa jumlah korban sampai bulan September tahun ini akibat operasi militer penumpasan PRRI di Sumatera yaitu ; dari pihak pemerintahan pusat ; korban tewas :983 orang, korban luka-luka :1.695 orang, hilang dalm tugas :154 orang. Sedangkan dari pihak PRRI sendiri ; korban tewas :6.373 orang, luka-luka/tertawan dalam

---

<sup>98</sup> Lihat lampiran. No.7. Gambar: 2.

<sup>99</sup> Soewardi Idris, *op.cit.*, hlm, 213.

perang :1.202 orang, dan yang menyerah kepada pemerintahan pusat :6.057 orang.<sup>100</sup>

Pada bulan Februari 1960 terjadi suatu peristiwa yang mengejutkan di kalangan PRRI sendiri yaitu diumumkannya Republik Persatuan Indonesia atau disingkat (RPI). Adapun Presiden merangkap Perdana Menteri RPI dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara dengan Wakil Mr. Muhammad Natsir. Republik Persatuan Indonesia (RPI) ini berbentuk federasi yang sesungguhnya telah lama tertunda yakni semenjak tanggal 17 Agustus 1959. Dalam pasal 3 UUD-nya disebutkan bahwa wilayah negaranya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Tujuan dari RPI adalah untuk mempersatukan PRRI/Permesta dengan DI/TII Daud Beureuh di Aceh dan DI/TII Kahar Muzakhar di Sulawesi Selatan. Bendera tetap Merah Putih, namun ada sejumlah bintang di tengah yang mana setiap bintang melambangkan masing-masing pemberontak (negara bagian) saat itu berada di bawah RPI.<sup>101</sup>

Proklamasi RPI itu terjadi di saat keadaan militer PRRI sudah berantakan, karena daerah-daerah PRRI sudah banyak yang dikuasai oleh pasukan APRI. Moril pasukan sudah mulai kendor yang dibarengi dengan kesulitan amunisi. Rata-rata setiap senjata perorangan hanya dilengkapi dengan sepuluh sampai dua puluh butir peluru, tentu ini tidak mungkin jadi andalan untuk suatu pertempuran. Orang segera berharapkan utuhnya Dwitunggal Sukarno-Hatta dengan Dekrit

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm 213-214.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm 58.

yang diperlakukan sejak pertengahan tahun 1959 membuat orang berfikir apakah pemberontakan ini masih akan diteruskan.<sup>102</sup>

Keppres No. 200/Th. 1960 dan No. 201/Th.1960 tanggal 17 Agustus 1960 tentang pembubaran partai politik Masyumi dan PSI.<sup>103</sup> Pada tanggal 19 September 1960 Mr. Moh. Natsir mengirim surat kepada empat tokoh militer PRRI, yakni Dahlan Djambek, Kolonel Ahmad Husein, Kolonel Sjoeb, dan Letkol Nurjiwan. Tokoh RPI Natsir mengkhawatirkan bahwa langkah pembentukan Komando Tunggal bisa melemahkan perjuangan mereka melawan Sukarno. KSAD Jenderal A.H. Nasution mengeluarkan seruan kepada semua pemberontak di Sumatera agar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Menjelang pertengahan tahun 1961, keadaan hampir sampai ke puncak kesulitan. Hanya beberapa desa terpencil saja di seluruh Sumatera yang belum dikuasai pasukan APRI, Kota Hilalang yang berpenduduk 2.500 jiwa itupun juga sudah dikuasai.<sup>104</sup>

Bertolak dari proklamasi RPI oleh Sjafruddin Prawiranegara tahun 1960 terjadi keretakan antara perwira-perwira Devisi Banteng karena di satu pihak dan golongan sipil pengikut Sjafruddin di pihak lain, sehingga hubungan antara anggota-anggotanya tidak harmonis. Simbolon dan Husein memisahkan diri dengan RPI dan membentuk pemerintahan Darurat Militer untuk melangsungkan kembali perundingan-perundingan dengan pihak militer, tetapi usaha itu selalu gagal. Pada tanggal 29 Mei 1961 Ahmad Husein dengan pasukannya disusul oleh

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm 59.

<sup>103</sup> Partai ini dianggap ikut melakukan pemberontakan, karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dengan pemberontakan apa yang disebut dengan PRRI' atau RPI' atau telah jelas memberikan bantuan terhadap pemberontak.

<sup>104</sup> Soewardi Idris, *op.cit.*, hlm 216. Lebih jelasnya lihat lampiran No. 1.

tokoh-tokoh RPI yang lain, baik sipil maupun militer secara resmi menyerahkan diri. Ahmad Husein resmi menyerahkan diri ke Solok, ikut bersamaan dengan 24.500 anggota militer dan sipil yang menyerahkan diri di berbagai kota.

Dengan demikian, maka Pemberontakan PRRI yang terjadi di Sumatera Barat dapat diatasi oleh tentara pusat. Anehnya, meskipun perlawanan yang diberikan kelompok PRRI terhadap tentara pusat tidak seimbang, perlawanan tersebut dapat berlangsung cukup lama yaitu sekitar 3 tahun.

Kesimpulan dari bab III adalah sehubungan dengan penolakan tuntutan otonomi daerah, ketegangan bermula ketika Ahmad Husein dalam rapat raksasa di Padang pada tanggal 10 Februari 1958 mengeluarkan ultimatum. Namun, ultimatum itu tidak dihiraukan oleh pemerintah pusat, sehingga Ahmad Husein membalasnya dengan memproklamakan berdirinya PRRI sebagai pemerintah tandingan pada tanggal 15 Februari 1958. Tindakan ini dinilai melanggar konstitusi, maka pemerintah pusat tanpa menunggu lama melakukan operasi militer untuk menindak tegas PRRI.

Tidak seimbangnya perlawanan yang diberikan oleh pasukan PRRI terhadap tentara pusat, maka perlawanan lalu dilakukan dengan bergerilya. Perlawanan yang tidak seimbang tersebut dapat berlangsung cukup lama sekitar 3 tahun yang berakhir pada tanggal 29 Mei 1961. Hipotesis yang dikembangkan yaitu kalau pemerintahan pusat memperhatikan dan mengabulkan tuntutan otonomi rakyat Sumatera Barat, maka Pemberontakan PRRI akan berhenti. Dengan demikian hipotesis kedua terbukti.

**BAB IV**  
**AKIBAT YANG DITIMBULKAN OLEH**  
**PEMBERONTAKAN PRRI**

Pemberontakan identik dengan kekerasan, kekerasan merupakan salah satu ciri dari sebuah perang dan tidak ada perang yang membawa kebaikan. Perang merupakan serentetan kejadian yang pada dasarnya tidak diharapkan oleh setiap manusia, mengingat akibat yang ditimbulkan tidak sedikit. Bukan hanya harta benda yang hilang, namun nyawa manusia juga menjadi tidak berharga. Dalam perang, yang ada hanya keinginan untuk membunuh orang-orang yang dianggap sebagai musuh, meskipun mereka sebelumnya adalah saudara sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah perang, kekerasan bukanlah sesuatu yang dapat dihindari, melainkan sebaliknya merupakan sesuatu yang menjadi kelaziman.<sup>105</sup>

Perang yang lebih menyakitkan adalah perang yang harus berhadapan dengan saudara sendiri yang sering disebut perang saudara, karena akan membawa pengaruh pada setiap masyarakat yang mengalaminya. Bekas-bekas yang ditinggalkan berupa fisik maupun mental yang akan selalu terasa hingga muncul ungkapan-ungkapan yang memilukan, di mana saudara saling bunuh dan tikam hanya untuk suatu ambisi tertentu.

Demikian pula dengan peristiwa yang terjadi pada paruh kedua tahun 1950-an di Indonesia. Sebuah pemberontakan yang bernuansa kekerasan menjadi

---

<sup>105</sup> Syamdani, *op.cit.*, hlm.83.

sesuatu yang tidak bisa dihindari setelah dua kepentingan yang berbeda tidak bisa dipertemukan kesepakatan bersama. Perang itu terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah di Sumatera Barat yang lebih dikenal dengan Pemberontakan PRRI. Perang yang terjadi dalam peristiwa PRRI merupakan salah satu contoh dari perang saudara, yang membawa akibat sangat parah dalam sejarah Indonesia baik di bidang politik maupun sosial ekonomi bagi bangsa Indonesia khususnya rakyat Sumatera sendiri.

### **A. Akibat Pemberontakan PRRI**

#### **1. Bagi Indonesia**

##### **a. Dampak Politik**

Meletusnya Pemberontakan PRRI dan runtuhnya gerakan ini secara cepat menimbulkan dampak yang besar terhadap hubungan luar negeri Indonesia. Ribuan nyawa yang telah menjadi korban dan tidak seorangpun dapat melupakan peristiwa tersebut dengan mudah. Sementara itu simpati dan dukungan Amerika Serikat dan sekutunya kepada PRRI sangat jelas nampak dan benar-benar merusak hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Terbukti, pada tanggal 18 Mei, seorang pilot sipil Amerika Serikat yang mengendalikan pesawat pengebom B-26 ditembak jatuh di atas Ambon ketika sedang melakukan aksi pengeboman sebagai dukungan kepada pihak pemberontak. Namun, Amerika akhirnya menyadari bahwa dirinya mendukung suatu gerakan yang akan mengalami kegagalan. Dalam usaha memperbaiki hubungan dengan Jakarta, Menteri Luar Negeri Amerika J.F. Dulles mengancam campur tangan untuk PRRI. Akan tetapi, peristiwa itu telah

meninggalkan suatu perasaan tidak enak dan membuat Sukarno serta banyak pemimpin lainnya cenderung memandang Amerika Serikat dengan kecurigaan yang bahkan lebih besar daripada yang biasanya terjadi antara negara berkembang dan negara besar.<sup>106</sup> PKI segera memanfaatkan moment ini yaitu memanfaatkan perasaan anti-Amerika di kalangan elit-politik maupun rakyat Indonesia untuk lebih mendapatkan simpati.

Malaysia yang mendeka pada tahun 1957 dan masih memerangi sisa-sisa keadaan darurat yang ditimbulkan oleh kaum komunis di negaranya sendiri, telah mambantu kaum pemberontak serta menjadi saluran utama bagi pemasok senjata, seperti halnya Singapura, Filipina, Taiwan, dan Korea Selatan juga menyatakan simpati kepada PRRI. Dengan demikian, keinginan Indonesia untuk melaksanakan kebijaksanaan luar negeri yang netral menjadi semakin sulit terwujud, karena daftar lawan semakin panjang.<sup>107</sup> Pada bulan Agustus 1958, Guomintang (Kuomintang) dilarang di Indonesia dan segera setelah itu tentara mengambil alih perusahaan-perusahaan Cina yang pro-Taiwan, sehingga secara tidak sadar telah memberi kesempatan kepada PKI untuk memonopoli dukungan politik dari kalangan masyarakat Cina di Indonesia.

Selain itu, keuntungan juga didapat oleh PKI dalam peristiwa PRRI yaitu, teror-teror yang terjadi di Jakarta, terutama yang ditujukan terhadap politikus

---

<sup>106</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta, Gajah Mada University Pres, 2005 hlm. 520.

<sup>107</sup> Pada awal tahun 1950-an, Kabinet Wilopo mengadakan kerjasama dengan Amerika Serikat, dan Amerika Serikat berusaha untuk memberikan bantuan kepada Indonesia. Namun, konsekuensinya kemudian adalah jatuhnya Kabinet Wilopo karena adanya anggapan bahwa dengan kerja sama dengan pihak Amerika berarti Indonesia telah jatuh ke salah satu Blok dari dua Blok yang ada di dunia ketika itu dan berarti bertentangan dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.

Masyumi dan PSI, kemungkinan besar dilakukan oleh PKI, mengingat kedua partai tersebut merupakan partai yang sangat anti terhadap PKI.<sup>108</sup> PKI sengaja melakukan tekanan mental dan fisik untuk melumpuhkan lawan-lawan politiknya, selain terus berusaha untuk mempengaruhi pemikiran Sukarno agar membenci politikus Masyumi dan PSI. Larinya kaum politisi dari kedua partai tersebut ke luar Jawa terutama ke Sumatera Tengah, menjadi kesempatan bagi PKI untuk melumpuhkan mereka, yaitu dengan mengatakan bahwa para politisi tersebut mendukung daerah dalam praktek melakukan pemberontakan yaitu bergabung dengan PRRI. Mengingat anti-pati yang sangat kuat dari politisi Masyumi dan PSI serta pemimpin militer di daerah terutama di Sumatera Tengah terhadap partainya.<sup>109</sup>

Untuk semakin menghangatkan situasi, PKI menuduh pihak militer daerah telah menggerakkan pemberontak demi untuk menutupi perbuatan korupsi yang telah mereka lakukan. Dengan kekalahan PRRI oleh tentara pusat, yang kemudian partai Masyumi maupun PSI dicap mendukung PRRI sebagai pengkhianat negara. Maka kemungkinan besar bagi PKI telah berhasil dan memperoleh kemenangan dari lawan-lawan politiknya<sup>110</sup> dengan hanya berpangku tangan.

### **b. Dampak Sosial Ekonomi**

Seiring dengan berakhirnya peristiwa Pemberontakan PRRI, tentunya akan berakibat pada lemahnya perekonomian negara, karena tidak sedikit biaya yang

---

<sup>108</sup> Nazuruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1989. hlm. 53.

<sup>109</sup> Syamdani, *op.cit.*, hlm. 51.

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

dikeluarkan oleh pemerintah untuk operasi militer di Sumatera Barat dan sekitarnya. Meskipun pada tahun 1956 telah dihasilkan undang-undang otonomi luas, namun pelaksanaan undang-undang tersebut tidak seperti yang diharapkan oleh daerah. Pemerintah pusat masih melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap daerah, penggunaan dana yang didapat sebagian besar dipakai oleh mereka yang ada di pulau Jawa, hal ini dilakukan pemerintah pusat guna menutupi kerugian yang disebabkan oleh dana yang dikeluarkan selama masa perang.

Masalah ekonomi, ternyata membawa dampak pada permasalahan sosial. Pembangunan yang hanya berpusat di Jawa telah melahirkan semacam golongan atau kelompok dalam negara yang secara garis besar dapat disebut sebagai kelompok Jawa dan luar Jawa.<sup>111</sup> Kelompok pertama merupakan kelompok pemegang kekuasaan. Sebagai kelompok penguasa mereka mendapat perlakuan istimewa dari Presiden, sedang kelompok kedua mendapatkan perlakuan yang kurang adil, kelompok ini umum berasal dari luar Jawa.

Dampak sosial dari Pemberontakan PRRI ini sangat besar. Keberhasilan penumpasan Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat oleh tentara APRI tidak menjadikan tentara pusat mendapat simpati dari masyarakat, bahkan banyak masyarakat umum yang mengecam tindakan pemerintah tersebut, sehingga tentara

---

<sup>111</sup> Walaupun istilah kelompok di sini dirasa kurang begitu tepat, karena dapat menyamakan arti, namun istilah kelompok ini lebih dimaksud untuk menggambarkan adanya dua pihak di mana antara satu dengan yang lain saling berlawanan. Kedua belah pihak itu adalah Jawa dan Luar Jawa. Kelompok luar Jawa adalah kelompok yang berusaha untuk menyalurkan aspirasi daerah-daerah dalam desentralisasi pembangunan seperti, Ahamad Husein, Syafruddin Prewiranegara, Hatta, Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Asa'at, Nadsir dan lain-lain. Sedang kelompok Jawa di antaranya Nasution, NU, PKI, dan PNI.

tidak disukai masyarakat secara umum. Penanganan pemerintah yang keras di bawah undang-undang darurat perang telah mengakibatkan pihak tentara mendapat banyak kecaman, sehingga memberi angin segar kepada mereka yang beranggapan bahwa kekuasaan tentara harus dibatasi. Di antara itu adalah Sukarno, yang lawan dan musuh-musuh lamanya dari kalangan politisi sipil, seperti Hatta dan Natsir, kini tidak berperan lagi. Sukarno dan pihak tentara menjadi bersaing dalam mengatur sistem politik yang sedang tumbuh, yang masih belum memainkan peranan penting, ingin sekali menempatkan dirinya sedekat mungkin dengan Sukarno. Presiden tidak begitu menghargai para pemimpin PNI seperti Ali Sastroamidjojo dan Hardi, dan semakin menganggap PKI sebagai sekutu utamanya dalam menghadapi pihak tentara.

## **2. Bagi Masyarakat Sumatera Barat**

### **a. Dampak Politik**

Dampak politik dari Pemberontakan PRRI ini sangat besar bagi masyarakat Sumatera Barat sendiri, selain peristiwa ini telah menodai Masyumi dengan cap pengkhianat seperti halnya peristiwa Medion mencemarkan nama PKI. Pemberontakan ini juga suatu bentuk langkah yang penting dalam mengkonsolidasi keunggulan Jawa atas daerah-daerah luar Jawa dan keunggulan pihak militer atas kekuatan-kekuatan politik lainnya.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> M. C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 522.

Berakhirnya Pemberontakan PRRI ini telah membantu menyederhanakan politik militer Indonesia. Sejumlah tokoh sipil dan militer ditangkap dan dipenjarakan oleh rezim Sukarno pasca Pemberontakan PRRI. Mereka kebanyakan ditahan/dikarantinakan di Rumah Tahanan Militer.<sup>113</sup> Banyak perwira militer yang membangkang di dikeluarkan dari urusan-urusan militer, sehingga Nasution menjadi pimpinan militer yang tidak tertandingi. Misalnya, pada bulan Juli 1958, pangkat Nasution dinaikkan menjadi Letnan Jenderal, sehingga dialah orang pertama yang mendapat pangkat tersebut selain Soedirman. Kebanyakan perwira-perwira yang diperhentikan itu berasal dari luar Jawa, sehingga korp perwira semakin banyak ditempati orang-orang Jawa; pada tahun 1960-an diperkirakan 60% sampai 80% perwira militer adalah orang yang berasal dari Jawa, pada hal jumlah kelompok suku itu hanya sekitar 45% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Keberanian seperti Husein, untuk mengatakan bahwa peristiwa PRRI bukan sebuah pemberontak dalam masa-masa awal peristiwa PRRI, tidak banyak ditemukan. Umumnya pelaku maupun rakyat kebanyakan cenderung untuk tidak berbicara banyak tentang situasi peristiwa PRRI sesungguhnya. Mereka terpaksa mengikuti arus, bagaimana yang dialirkan oleh pemerintah dan tidak berani membantah cap pemberontak yang dipasang di pundak mereka. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, ada pula rakyat yang mengganti namanya dengan

---

<sup>113</sup> Lihat lampiran. No. 8.

nama Jawa, seperti Matias menjadi Matyoso<sup>114</sup> sebagai wujud ketakutan terhadap tekanan pemerintah pada pelaku dan pendukung PRRI. Namun, belakangan, seiring dengan tersingkirnya orde baru, dan derasnya arus reformasi tampak bahwa para pelaku dan rakyat Sumatera Barat umumnya mulai berbicara agak bebas mengenai peristiwa PRRI.

### **b. Dampak Sosial Ekonomi**

Pembunuhan merupakan hal yang biasa dalam sebuah perang fisik. Demikian pula perang yang terjadi antara pihak PRRI dengan tentara pusat. Selama berlangsung Pemberontakan PRRI banyak sekali terjadi pembunuhan di tengah masyarakat.<sup>115</sup> Banyak di antara mereka tidak dikuburkan secara sah yaitu dilakukan dengan penguburan massal.

Pembunuhan terus terjadi di banyak tempat, perkaranya tidak selalu berkaitan langsung dengan permasalahan perseteruan pusat dan daerah, melainkan efek samping dari peristiwa itu. Ada di antara masyarakat yang memanfaatkan peristiwa PRRI sebagai ajang balas dendam antar teman. Masa darurat militer telah memberi peluang untuk saling membunuh tanpa harus takut dibawa ke pengadilan.

Bentuk kekerasan lain yang terjadi selama peristiwa Pemberontakan PRRI adalah penyiksaan fisik. Para korban disiksa dengan berbagai cara seperti di belek,

---

<sup>114</sup> Letkol. Purn. Sjoë'ib, "Era Eksperimen Politik dari Soekarno 1956-1966", Makalah Seminar. Sehari "Peringatan 50 tahun Hubungan Indonesia-Amerika Serikat", di Universitas Indonesia, Depok, Jakarta, 27 Oktober 1998.

<sup>115</sup> Fajar Mardhatillah, "PRRI, antar 'Harimau' dan Buaya", majalah, No. 11/Th.11 Agustus/1998

yaitu disuruh mandi dengan sabun di kolam yang berisi lintah.<sup>116</sup> Penyiksaan semacam ini sering disebut barandam sebatang sabun. Bentuk kekerasan lain yang terjadi pada masa PRRI adalah teror. Teror adalah suatu hal atau tindakan disengaja yang mendatangkan ketakutan pada orang lain.<sup>117</sup>

Hampir setiap orang yang hidup di zaman PRRI dapat menceritakan bagaimana dan sulitnya suasana kehidupan di Sumatera Barat setelah peristiwa tersebut. Sebagai orang kalah, orang Minang harus pandai menyembunyikan perasaannya. Penghinaan yang sangat menyakitkan bagi masyarakat Minang adalah ketika rumah-rumah mereka diberi tanda silang sebagai tanda pemberontak dan keluarga mereka dikucilkan oleh masyarakat lain. Pengucilan itu terjadi karena adanya rasa takut oleh warga yang lain untuk diperlakukan sama. Lengkap sudah penderitaan akibat penghinaan yang dialami oleh warga Minang yang disebabkan hukum sosial yang dipaksakan oleh pemerintah di bawah todongan senjata.

Pemberontakan PRRI ini juga berdampak terhadap kehidupan ekonomi bagi masyarakat Sumatera Barat. Misalnya, dampaknya terhadap kehidupan keluarga mereka yang menyelamatkan diri dari peluru nyasar atau libasan senjata lain. Mereka harus terpisah dari anggota keluarganya dan sampai saat itu tidak tahu keberadaannya di mana. Mereka yang terpisah dari keluarganya harus memulai

---

<sup>116</sup> Betti Yusfa, *Kekerasan Dalam Zaman PRRI di Tilatang Kamang 1958-1961*, Makalah, (Padang:FPIPS IKIP Padang, 1998, hlm. 16.

<sup>117</sup> Audrey Kahin, *op.cit.*, hlm. 140-144.

hidup baru dan terus berusaha mencari keberadaan keluarga mereka yang masih hidup. Mereka juga harus membangun rumah baru akibat perang saudara, membuka lahan-lahan baru untuk bekerja atau mencari pekerjaan lain. Persoalan krusial yang sering muncul adalah masalah pengangguran, kelangkaan terhadap kebutuhan rumah tangga, kekurangan gizi, kurang terjaminnya kesehatan dan putus sekolah.

Seiring dengan kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang tidak menentu. Perputaran uang di Sumatera Barat sangat berperan dalam mempengaruhi perekonomian wilayah tersebut. Penghapusan uang atau tidak berlakunya kembali uang yang telah disahkan oleh PRRI semasa perang dahulu,<sup>118</sup> menyebabkan perputaran di wilayah tersebut sangat lambat. Aktifitas pasar di wilayah Sumatera Barat belum menunjukkan kegiatan yang berarti. Meskipun di pasar-pasar ada yang berjualan namun minat beli dari masyarakat masih sangat rendah. Semua itu disebabkan karena jumlah uang yang beredar di wilayah tersebut masih sangat sedikit, sehingga masyarakat umumnya sangat berhati-hati untuk menggunakan uang yang dimiliki.

Maka sangat diragukan apakah mereka akan bisa menopang kemandirian ekonomi mereka setelah pemberontakan selesai dengan kekalahan. Memang diakui bahwa wilayah Sumatera Barat memiliki sumber daya alam (SDA) yang

---

<sup>118</sup> Tahun 1959 pemerintah pusat menarik uang yang sedang beredar dan mengganti dengan uang baru. Kebijakan ini merepotkan PRRI, akhirnya pimpinan PRRI Ahmad Husein menempuh suatu kebijaksanaan yaitu mencap uang yang beredar tersebut dengan stempel Devisi Banteng, kemudian menandatangani sendiri. Untuk lebih jelasnya lihat contoh uang di lampiran. No. 7. Gambar: 1 dan 2.

melimpah seperti; padi, kopi, cengkeh, tembakau, dan bahan tambang. Tetapi sumber daya manusia (SDM) Sumatera Barat masih rendah, sehingga sulit bagi mereka untuk mengolah bahkan memasarkan hasil produksi dengan baik, dengan melihat keadaan perekonomian yang ada.

Sumber daya manusia Sumatera Barat yang masih kurang dibanding dengan daerah Jawa, cukup sulit bagi daerah tersebut untuk memulihkan pembangunan. Apalagi untuk bersaing dengan daerah lain seperti pulau Jawa. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menata kembali perekonomian yang telah hancur akibat perang saudara tersebut.

Kesimpulan dari bab IV adalah penangan pemerintah yang keras di bawah undang-undang darurat perang telah mengakibatkan pihak tentara mendapat banyak kecaman. Berakhirnya pemberontakan ini mengakibatkan semakin parahnya perekonomian Indonesia khususnya perekonomian masyarakat Sumatera Barat, karena tidak sedikit kerugian sebagai akibat dari perang. Di lain pihak, meletusnya pemberontakan ini dan runtuhnya gerakan ini telah membantu menyederhanakan politik PKI yang dapat memperoleh kemenangan dengan mudah dari lawan-lawan politiknya di Indonesia. Sedangkan hipotesis yang diajukan yaitu kalau Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat tidak berhasil, maka secara langsung akan terjadi kekacauan di bidang, politik, sosial dan ekonomi bagi Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Barat sendiri, ini berarti hipotesis ketiga terbukti.

## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab II, III dan IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dilatarbelakangi oleh kondisi politik bangsa Indonesia yang tidak stabil karena pecahnya Dwitunggal Sukarno-Hatta dan berkembangnya paham komunis di Indonesia serta perekonomian bangsa Indonesia yang semakin parah sebagai akibat tidak seimbangnya pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Selain itu, kekacauan dalam tubuh angkatan darat dengan munculnya dewan-dewan di Sumatera sebagai reaksi ketidakpuasan daerah terhadap kekuasaan yang semakin sentralistik. Untuk menghindari dampak yang semakin buruk, pemerintah daerah Sumatera Barat menginginkan agar sistem sentralisasi diganti dengan desentralisasi. Namun, tuntutan daerah yang ditujukan kepada pemerintah pusat tidak pernah ditanggapi. Karenanya daerah Sumatera Barat kemudian melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan pusat. Dengan demikian, kalau pemerintahan pusat masih menerapkan sistem sentralistik dan tidak memperhatikan pembangunan wilayah di luar pulau Jawa khususnya di Sumatera Barat, maka akan terjadi Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Dengan demikian hipotesis I penelitian diterima.

Perlawanan pasukan PRRI terhadap tentara pusat ternyata tidak seimbang karena kekuatan militer pusat terlalu besar, sehingga perlawanan dilakukan dengan cara bergerilya. Perang tersebut dapat berlangsung cukup lama yaitu

sekitar 3 tahun dan diakhiri pada tanggal 29 Mei 1961, ketika Ahmad Husein selaku pimpinan PRRI dengan pasukannya disusul dengan tokoh-tokoh RPI yang lain, baik sipil maupun militer secara resmi menyerahkan diri kepada pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kalau pemerintahan pusat memperhatikan dan mengabulkan tuntutan otonomi rakyat Sumatera Barat, maka Pemberontakan PRRI akan berhenti. Dengan demikian hipotesis II penelitian diterima.

Keberhasilan tentara pusat menumpas Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dengan penanganan yang keras di bawah undang-undang darurat perang mengakibatkan pihak tentara banyak mendapat kecaman dari masyarakat umum. Selain itu, berakhirnya pemberontakan ini mengakibatkan semakin memperburuk perekonomian Indonesia khususnya perekonomian masyarakat Sumatera Barat, karena tidak sedikit kerugian berupa harta benda dan nyawa manusia. Di lain pihak, muncul dan berakhirnya pemberontakan ini telah membantu mempermudah usaha PKI memperoleh kemenangan dalam percaturan politik di Indonesia. Dengan demikian, kalau Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat tidak berhasil, maka secara langsung akan terjadi kekacauan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi bagi bangsa Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Barat sendiri. Dengan demikian hipotesis III penelitian diterima.

Berdasarkan kesimpulan I, II dan III, maka dapat dikatakan bahwa ketiga hipotesis penelitian diterima.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alisjahbana, S. Takdir. 1957. *Perjuangan Untuk Autonomi dan Kedudukan Adat di Dalamnya*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Emizal Amri. 1988. *Indonesia di Bawah Sistem Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin (1950-1965)*. Padang: FPIPS IKIP.
- Deliar Noer. 1988. *Muhammad Hatta, Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Djopari, R.G. John. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: P.T. Gramedia Widiasarana.
- Dudung Abdurahman. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Rus Media.
- Hadi Subandio. 2002. *Keterlibatan Australia Dalam Pemberontakan PRRI/Permesta*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Ui Press.
- Harvey, Barbara Sillirs. 1984. *Permesta Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Helius Syamsudin. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Kahin, Audrey. 1997. *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, Menyikapi Keterlibatan CIA di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- .....2005. *Dari Pemberontakan ke Integrasi; Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya

- Legge, John, D. 1996. *Soekarno Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Leirissa, R.Z. 1991. *PRRI/Permesta Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Moedjanto, G. 1994. *Ilmu Sejarah dan Masa Depan*. Yogyakarta: Basis no. 9 Seri XLII.
- Nasarudddin Sjamsuddin. 1988. *Soekarno Pemikir Politik dan Kenyataan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pres.
- .....1989. *Integrasi Politik Indonesia*. Jakarta: P.T. Gramedia.
- Nasution, A.H. 1984. *Memenuhi Panggilan Tugas*. Jakarta: Gunung Agung.
- Payung Bangun. 1996. *Kolonel Maludin Simbolon: liku-liku perjuangan dalam pembangunan bangsa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rapar, J.R. 1988. *Filsafat Aristoteles*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ricklefs, M.C. (2005) *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres.
- Rusli Amran. 1981. *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sartono Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto. 1985. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: .....
- .....1984. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.

Soewardi Idris. 2008. *Perjalanan Dalam Kelam, Sinarai Kisah Pemberontakan PRRI*. Yogyakarta: Baranda Publishing.

Sumual, H.N. Ventje. 1998. *Segi Pandang "Permesta"-50 tahun Hubungan Indonesia Amerika Serikat*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia*. Jakarta: LP3ES

Syamdani. 2008. *PRRI Pemberontakan Atau Bukan*, Yogyakarta: Medpres (Anggota IKPI).

Winarno Surahmad. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito

**Referensi Tambahan;**

Fajar Mardhatillah. 1998. *PRRI, antar Harimau dan Buaya*. Majalah. No. 11/Th.11 Agustus.

Betti Yusfa. 1998. *Kekerasan dalam Zaman PRRI di Tilatang Kamang 1958-1961*. Makalah. Padang: FPIPS IKIP.

Letkol. Purn. Sjoeb, 1998. "*Era Eksperimen Politik dari Soekarno 1956-1966*", Makalah Seminar. Sehari "*Peringatan 50 tahun Hubungan Indonesia-Amerika Serikat*". di Universitas Indonesia. Depok. Jakarta. 27 Oktober.

Kol. J.W. Warouw. 1958. *Asas-asas dan Tujuan Perjuangan PRRI*. 17 Agustus.

Lampiran 1

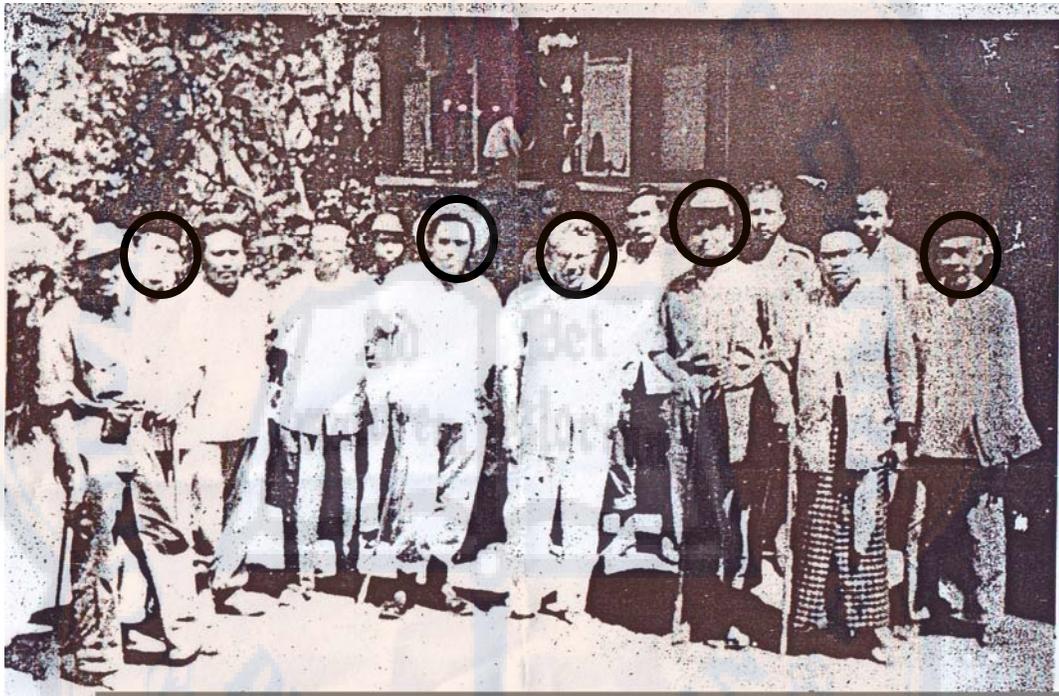


Lampiran 2

Foto tokoh-tokoh PRRI



Gambar: 1  
Kolonel Maluddin Simbolon



Gambar: 2

Keterangan:

Dari kiri (dalam lingkaran): Burhanuddin Harahap, Dahlan Djambek, Sjafruddin Prawiranegara, Kolonel Maluddin Simbolon, Mr. Assaat

### Lampiran 3

#### I. PIAGAM PERSETUJUAN PELEMBANG

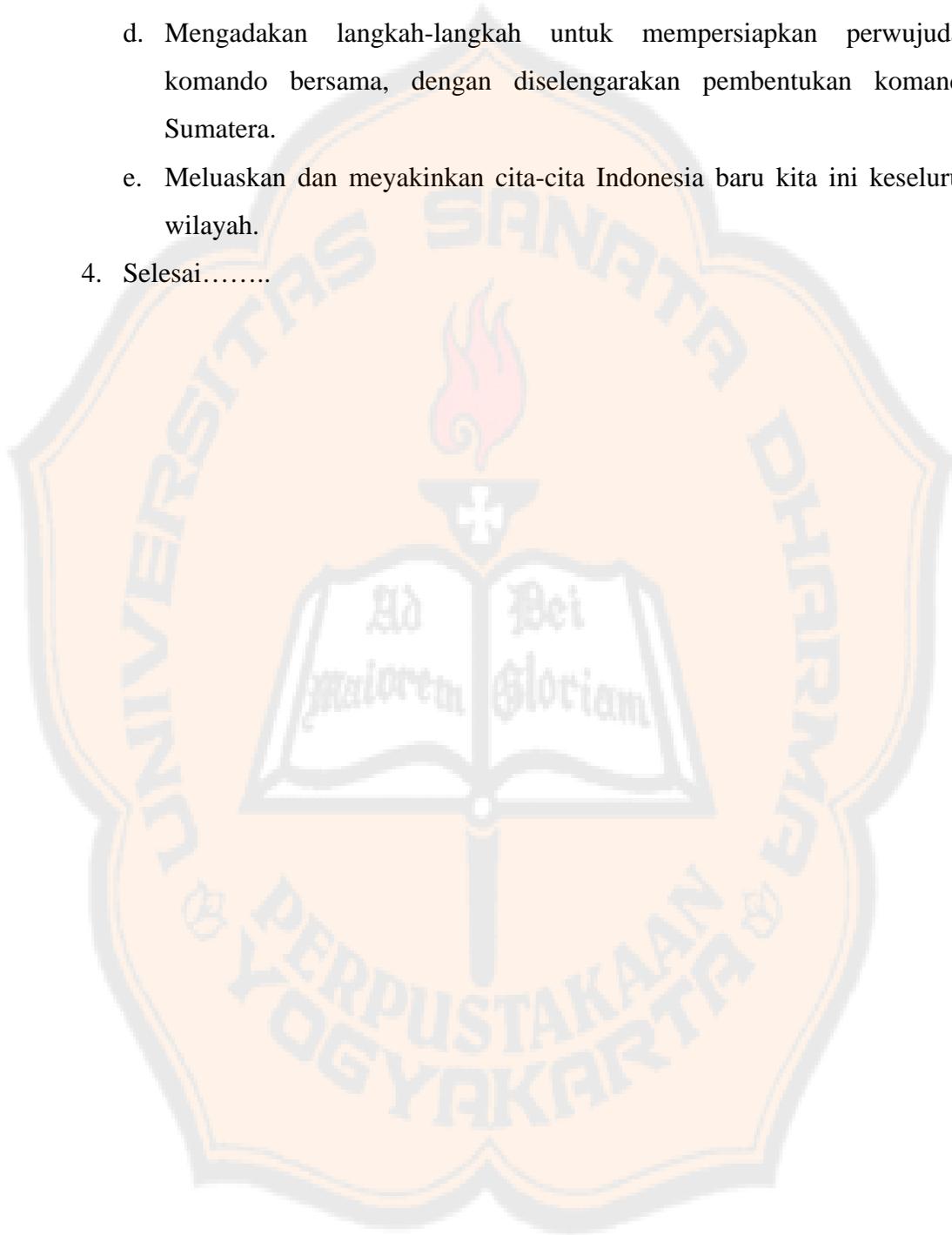
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Letkol Kolonel Ahmad Husein.
2. Letkol Kolonel H.N. Sumuel
3. Letkol Kolonel Barlian

Setiap pemimpin daerah bergolak, setelah mengadakan perundingan yang mendalam mulai tanggal 7 sampai 8 September 1957, bertempat di staf Kwartir TT-II Palembang, mengambil keputusan bersama sebagai berikut :

1. Tentang Musyawarah Nasional
  - a. Kami belum mempunyai keyakinan, melihat kenyataan-kenyataan yang berlaku, bahwa Munas tanggal 10 September yang akan datang ini akan merupakan musyawarah yang akan menghasilkan penyelesaian nasional.
  - b. Demi untuk mengharapakan tiap-tiap usaha kearah musyawarah, maka kami mengambil ketetapan memerlukan hadir.
  - c. Kehadiran kami itu adalah dengan tujuan sekurang-kurangnya dapat memperjuangkan tercapainya musyawarah yang sebenarnya.
2. Pokok-Pokok Tuntutan
  - a. Menuntut segera pemulihan Dwitunggal dalam rangka pimpinan negara, demi untuk keutuhan negara dan bangsa dan jika itu tidak mungkin, harus diambil jalan tegas.
  - b. Segera mengganti pimpinan AD sebagai langkah pertama terhadap stabilitas TNI yang akan menjadi landasan mutlak bagi stabilitas negara.
  - c. Dilaksanakan desentralisasi dalam sistem pemerintahan negara yang antaranya meliputi pemberian otonomi yang luas bagi daerah dan reorganisasi dalam organ-organ sentral bagi pusat.
  - d. Pembentukan senat.
  - e. Peremajaan dan penyederhanaan diseluruh lapangan dan tingkatan
  - f. Melarang komunisme yang pada dasarnya berpusat internasional

3. Kordinasi Perjuangan
  - a. Solider/konsekuen mengutuk dan menentang segala jalan kekerasan fisik maupun adminitrasi yang mungkin diambil pusat terhadap suatu daerah pengikut.
  - b. Mengadakan koordinasi kerjasama militer dan finel.
  - c. Sebagai urgensi pertama segera mewujudkan perhubungan radio/
  - d. Mengadakan langkah-langkah untuk mempersiapkan perwujudan komando bersama, dengan diselenggarakan pembentukan komando Sumatera.
  - e. Meluaskan dan meyakinkan cita-cita Indonesia baru kita ini keseluruhan wilayah.
4. Selesai.....



## Lampiran 4

### Ultimatum Dewan Banteng

Pada tanggal 10 Februari 1958, Achmad Husein berpidato berupa ultimatum kepada pemerintahan pusat yang disiarkan melalui RRI di Padang yang isinya:

1. Dalam waktu 5 x 25 jam sejak diumumkannya tuntutan itu :
  - a. Kabinet Djuanda harus menyerahkan mandat kepada Presiden atau pejabat presiden atau,,'
  - b. Presiden atau Pejabat Presiden mencabut mandat kabinet Djuanda
2. Presiden atau pejabat presiden memberikan tugas kepada Drs. Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk *zaken kabinet*, terdiri dari tokoh-tokoh yang jujur, berwibawa, dan cakap, bebas dari anasir anti Tuhan. Tugas dari zaken-kabinet ialah menyelamatkan negara dari keruntuhan dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) dan meletakkan pembangunan dasar negara.
3. Minta kepada Drs. Muhammad Hatta dan Hamengkubuwono IX untuk menyediakan diri menolong negara dan bangsa
4. Menurut Kepala Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemimpin-pemimpin lainnya untuk bersama-sama mengizinkan Mohammad Hatta dan Hamengkubuwono IX menyelamatkan bangsa dan negara.
5. Meminta kepada Presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai presiden konstitusi, dengan membuktikan dengan kata-kata dan perbuatan dan memberi kesempatan kepada Drs. Muhammad Hatta dan Hamengkubuwono IX untuk melakukan kewajibannya sampai pemilihan umum yang akan datang.

Apabila sub 1 dan sub 2 tidak dilaksanakan, Achmad Husein cs. Akan mengambil langkah kebijaksanaan sendiri. Apabila sub 1 dan sub 2 dilaksanakan sedangkan sub 5 tidak, maka mulai saat ini Achmad Husein cs mengagap dirinya bebas dari wajib taat kepada Presiden Soekarno sebagai kepala negara.

## Lampiran 5

### Jawaban Pemerintah Atas Ultimatum Dewan Banteng

Mendengar Ultimatum daerah yang diwakili oleh Dewan Banteng, maka pada tanggal 11 Februari 1958, kabinet Djuanda langsung mengadakan sidang. Sidang saat itu juga dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Selain itu juga dihadiri oleh Sekertariat Jenderal Kementerian Pertahanan. Hasil keputusan siding kabinet tersebut antara lain :

1. Pemerintah pusat menolak Ultimatum Achmad Husein dan kawan-kawanya.
2. Berdasarkan Peraturan No. 3 Tahun 1958 pasal 1 ayat 2 kemudian diambil keputusan.
  - a. Letkol Acmad Husein
  - b. Kolonel Zulkifli Lubis
  - c. Kolonel Dahlan Djambek
  - d. Kolonel Simbolon

Keempat perwira tersebut dibebaskan dari dinas tertara tidak dengan hormat, karena :

- Melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan disiplin seluruh angkatan perang
- Membahayakan keamanan dan keselamatan negara.

## Lampiran 6

### Jawaban Atas Penolakan Ultimatum Oleh Pusat

Tanggal 15 februari 1958, kabinet tandingan dengan nama PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) diumumkan di Bukittinggi-Sumatera Barat pukul 22.30. Sebagai jawaban atas Ultimatum yang tidak dijawab pemerintahan pusat, dengan Sjafruddin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Susunan Kabinet PRRI adalah sebagai berikut :

1. Perdana Menteri: Mr. Sjafruddin Prawiranegara
2. Menteri Keuangan: Mr. Sjafruddin Prawiranegara
3. Menteri Luar Negeri: Kolonel Maludin Simbolon
4. Menteri Dalam Negeri: Kolonel Dahlan Djambek
5. Menteri Pembangunan: Kolonel J.F. Warouw
6. Menteri Pertahanan: Burhanuddin Harahap
7. Menteri Kehakiman: Burhanuddin Harahap
8. Menteri Perhubungan/Pelayaran: Sumitro Djojohadikusumo
9. Menteri Perdagangan: Sumitro Djojohadikusumo
10. Menteri PP&K: Mohammad Sjafei
11. Menteri Kesehatan: Mohammad Sjafei
12. Menteri Pertanian: Saladin Sarumpait
13. Menteri Perburuan: Saladin Sarumpait
14. Menteri Agama: Moctar Lintang
15. Menteri Penerangan: Letkol Mohammad Saleh Lahede
16. Menteri Sosial: A. Gani Usman

Angkatan perang bernama Angkatan Perang Revolusioner dengan Angkatan Darat Revolusioner (ADREV), Angkatan Udara Revolusioner (AUREV), Angkatan Laut Revolusioner (ALREV). Selain kepolisiannya yang bernama Polisi Revolusioner (Polrev)

Lampiran 7



Gambar: 1

*Setelah uang yang beredar ditarik dan ditukar dengan uang baru (1959), Sjafruddin mengeluarkan uang sendiri sejak September 1959.*



Gambar: 2

*Tanggal penyerahan diri penulis pada uang PRRI.*

## Lampiran 8

### Tokoh-Tokoh Yang Di Tahan Pasca PRRI.

Sejumlah tokoh sipil dan militer ditangkap dan dipenjarakan oleh rezim Sukarno pasca Pemberontakan PRRI antar lain :

- b. Mr. Sjafruddin Prawiranegara, mantan Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI, mantan Gubernur Bank Sentral Indonesia;
- c. Mr. Asaat, mantan Pejabat Presiden Republik Indonesia;
- d. Mr. Burhanuddin Harahap, mantan Perdana Menteri RI;
- e. Mr. Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri RI;
- f. Sultan Sjahrir, Mantan Perdana Menteri RI
- g. Mr. Muhammad Roem, Mantan Menlu RI;
- h. Mr. Prawoto, mantan Menteri RI;
- i. Otto Rondonuwu;
- j. Anak Agung Gde Agung, mantan Menlu RI;
- k. Sultan Hamid Alkadri II, mantan Menteri Negara RIS;
- l. Subadio Sastrosatomo, mantan Ketua PSI;
- m. Moctar Lubis, wartawan;
- n. Haji Johannes Cornelis Prince, praktisi HAM;
- o. Bapak Muhammad Saleh;
- p. K. H. Z. E. Mustaqim;
- q. Buya Hamka;
- r. Bapak Hasan Wartawan;
- s. Kolonel Zulkifli Lubis, mantan Wakil KSAD TNI;
- t. Kilonel Maluddin Simbolon, mantan Panglima TT-I/Bukit Barisan;
- u. Letkol H.N. Ventje Sumual, mantan Panglima TT-VII/Wirabuana;
- v. Letkol Ahmad Husein, mantan Panglima Sumatera Barat;
- w. Mayor Nawawi, mantan Kepala Staf Wilayah Sumatera Selatan;
- x. Mayor J.M.J. (Nun) Pantauw, mantan Asisten I Staf KO TT-VII!Wirabuana;
- y. Mayor Dof Runturambi, mantan Kepala Staf Gubernur Militer Sulutteng;
- z. Dan beberapa orang bekas pejabat sipil lainnya.

**Lampiran 9**

**Fakta/Kronik Pemberontakan PRRI.**

Jumlah Korban Pemberontakan PRRI

<b>Pihak PRRI</b>		
No	Korban	Jumlah
1	Tewas	22.174 Orang
2	Hilang Dalam Tugas	4.360 Orang
3	Ditawan	8.072 Orang
<b>Pihak Pemerintahan/APRI</b>		
1	Tewas	10.150 Orang

Tabel : 1

Jumlah Korban di Daerah Oparasi Kodam II/17 Agustus (Sumatera Barat/Riau).

<b>Pihak Kodam III/APRI</b>		
No	Korban	Jumlah
1	Tewas	1.031 Orang
2	Hilang Dalam Tugas	154 Orang
3	Luka-luka	1.695 Orang
<b>Pihak PRRI</b>		
4	Tewas	6.115 Orang
5	Hilang	627 Orang
6	Menyerah	6.057 Orang

Tabel:2

Perbandingan Kekuatan Selama Pemberontakan.

Pemerintahan	50.000 Orang
PRRI	10.000 s/d 15.000 Orang

Tabel:3

Kekuatan Armada Operasi 17 Agustus

TNI AL :

6 kapal perang dan 19 kapal angkut, yang keduanya membawa 6.500 pasukan berikut satu batalyon KKO TNI-AL

TNI AU :

25 pesawat C-47 Dakota

6 pesawat pemburu P-51 Mustang

8 pembom B-25 Mitchell 6 At-16 Harvard

Silabus

Nama Sekolah : SMA Santo Mikael  
 Program : Ilmu Pengetahuan Sosial  
 Mata Pelajaran : Sejarah  
 Kelas : XII  
 Semester : 1  
 Standar Kompetensi : Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak Proklamasi hingga lahirnya Orde Baru  
 Alokasi waktu : 1 X 45 Menit

KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	INDIKATOR	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER dan MEDIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman integrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antar lain: PKI Medion 1948, DI/TII, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disitegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan Pemberontakan PRRI di Sumatera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menganalisis Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disitegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan Pemberontakan PRRI di Sumatera, melalui studi pustaka, diskusi kelompok, presentasi, dan diskusi kelas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siswa mampu menganalisis Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disitegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan Pemberontakan PRRI di Sumatera.</li> <li>Siswa mampu menganalisis latar belakang munculnya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat.</li> <li>Siswa mampu menganalisis jalannya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat tahun 1958-1961.</li> </ul>	Instrumen/alat: <ul style="list-style-type: none"> <li>Portofolio (<i>portfolio</i>)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bentuk: makalah</li> <li>b. alat: skala nilai</li> </ul> </li> <li>Unjuk kerja (<i>performance</i>)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bentuk: presentasi</li> <li>b. alat: skala nilai</li> </ul> </li> <li>Sikap                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bentuk: observasi guru</li> </ul> </li> </ul>	1x45 menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audrey Kahin. 2005. <i>Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1923-1998</i>, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.</li> <li>Emizal Amri. 1988. <i>Indonesia dibawah Sistem Demokrasi Liberal dan Demokarsi Terpimpin (1950-1965)</i>. Padang: FPIPS IKIP.</li> </ul> <p><b>Alat/media:</b></p>

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Siswa mampu menganalisis akibat yang ditimbulkan dari Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat.</li><li>• Afektif: Siswa mampu mengungkapkan nilai keadilan, saling menghargai yang berkaitan dengan penyelesaian masalah Pemberontakan PRRI</li><li>• Afektif: siswa dapat memahami dan menerapkan tentang arti kemajemukan suku bangsa, guna mencegah munculnya disintegrasi bangsa dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan.</li></ul>	<p>b. alat: skala sikap</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tertulis</li><li>a. bentuk: pilihan ganda dan essay dengan jawaban singkat</li><li>alat: tes</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• komputer dan viewer (program powerpoint).</li><li>• papan tulis (black/white board).</li></ul>
--	--	--	--	--	--

Yogyakarta, 25 Maret 2009  
SMA St. Mikael  
Bidang Studi Pendidikan Sejarah

.....  
Joko Suryanto.  
NM : 041314017

## RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)

Nama Sekolah : SMA St. Mikael  
Program : Ilmu Pengetahuan Sosial  
Mata Pelajaran : Sejarah  
Kelas/ Semester : XII / 1  
Alokasi Waktu : 1 x 45 menit (satu pertemuan)  
Standar Kompetensi : Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak Proklamasi hingga lahirnya Orde Baru  
Kompetensi dasar : Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman integrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antar lain: PKI Mediuon 1948, DI/TII, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G-30-S/PKI)

- Indikator :
  1. Siswa mampu menganalisis Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disitegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan PRRI di Sumatera
  2. Siswa mampu menganalisis latar belakang munculnya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat.
  3. Siswa mampu menganalisis jalannya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat tahun 1958-1961.
  4. Siswa mampu menganalisis akibat yang ditimbulkan dari Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat.

### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Siswa dapat menjelaskan latar belakang munculnya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan situasi politik masa Demokrasi Terpimpin di sekitar peristiwa pergolakan daerah terutama Pemberontakan PRRI.
2. Siswa dapat menjelaskan jalannya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat tahun 1958-1961.
3. Siswa dapat menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat.

### B. MATERI PEMBELAJARAN

1. Latar belakang munculnya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat tahun 1958-1961.
2. Proses jalannya Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat tahun 1958-1961.
3. Akibat yang ditimbulkan oleh Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat.

### C. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN

Pendekatan : Cooperative Learning (CL)  
Metode : dengan “Teknik Mencari Pasangan”

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## D. KEGIATAN PEMBELAJARAN

JENIS KEGIATAN/ KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU
<b>1. KEGIATAN AWAL:</b> 1) Memberi apersepsi dan tanya jawab mengenai tokoh-tokoh nasional pada masa Demokrasi Terpimpin. 2) Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini. 3) Memberi petunjuk langkah kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan siswa, yaitu “mencari pasangan”.	<b>10 menit</b>
<b>2. KEGIATAN INTI:</b> 1) Guru membagikan 1 kartu kepada setiap siswa yang berisi satu materi/informasi. Di mana tiap kartu materi berisi informasi yang berbeda dan mempunyai <i>pasangan</i> informasi yang merupakan rangkaian dari satu materi. 2) Siswa yang telah mendapatkan kartu informasi harus mencari pasangan yang mempunyai lanjutan informasi yang berkaitan dengan materi yang ada pada kartu mereka. 3) Setelah menemukan pasangannya (pemegang kartu lanjutan informasi), kemudian berkumpul membentuk kelompok untuk mendiskusikannya. 4) Setiap kelompok melaporkan hasil kerjanya, dilanjutkan dengan tanya jawab. 5) Guru mengklarifikasi atas hasil diskusi, serta memberikan penguatan/penegasan poin-poin penting dari pembahasan.	<b>30 menit</b> (mencari pasangan dan diskusi)
<b>3. PENUTUP:</b> 1) Guru meninjau kembali/memberi kesimpulan terhadap keseluruhan materi yang baru saja dipelajari. 2) Pemberian refleksi kepada siswa/ balikan.	<b>5 menit</b>

## E. SUMBER dan MEDIA BELAJAR

### Sumber Belajar:

1. Ricklefs M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
2. Audrey Kahin. 2005. *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1923-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
3. Emizal Amri. 1988. *Indonesia dibawah Sistem Demokrasi Liberal dan Demokarsi Terpimpin (1950-1965)*. Padang: FPIPS IKIP.

**Media Belajar:** komputer dan viewer (program powerpoint), papan tulis (black/white board), Gambar tokoh dan Peta Indonesia khususnya peta Sumatera..

## F. PENILAIAN

- Portofolio (*portfolio*)
  - c. bentuk: makalah
  - d. alat: skala nilai

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Unjuk kerja (*performance*)
  - c. bentuk: presentasi
  - d. alat: skala nilai
- Sikap
  - c. bentuk: observasi guru
  - d. alat: skala sikap
- Tertulis
  - b. bentuk: essay
  - c. alat: tes

➤ **Penilaian Proses**

1). Performance (presentasi)

<i>Nama</i>	<i>Keaktifan</i>	<i>Keantusiasan</i>	<i>Kerjasama</i>	<i>Penampilan</i>	<i>Jumlah</i>

**Skor Total**

**1. Skor ----- X 100%**

**20**

**Keterangan :**

- Skor 1: Tidak antusias, pasif, kurang kooperatif dan tidak serius
- Skor 2: Tidak antusias, pasif, kurang kooperatif tetapi serius
- Skor 3: Tidak antusias, pasif, tetapi kooperatif, dan serius
- Skor 4: Antusias, kooperatif, dan serius
- Skor 5: Sangat antusias, kooperatif, serius dan aktif

2). Pengamatan

Lembar observasi terlampir

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

99

**Skor penilaian Proses : pengamatan (60%) + Performance (40%)**

➤ **Penilaian Produk**

1. Makalah : isi pembahasan
2. Portopolio
- 3.

**Nilai akhir : Skor penilaian Produk (40%) + skor penilaian Skor Proses (60%)**

✓ *Tindak Lanjut:*

- a. Siswa dinyatakan berhasil jika tingkat pencapaiannya 75% atau lebih
- b. Memberi program perbaikan atau remidi (tugas) untuk siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari 75%
- c. dsb

Yogyakarta, 25 Maret 2009  
SMA St. Mikael  
Bidang Studi Pendidikan Sejarah

  
.....  
Joko Suryanto  
NIM : 141314017